

**ANALISIS PENGARUH ASPEK SOSIAL EKONOMI DALAM PENGELOLAAN  
HUTAN KEMASYARAKATAN TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT:  
STUDI KASUS DI GAPOKTAN KARYA TANI MANDIRI DAN KARYA BAKTI  
KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**DEWI SRI WAHYUNI**



**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### **ANALISIS PENGARUH ASPEK SOSIAL EKONOMI DALAM PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT: STUDI KASUS DI GAPOKTAN KARYA TANI MANDIRI DAN KARYA BAKTI KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

**DEWI SRI WAHYUNI**

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat dan keberadaannya telah membantu masyarakat dalam mengubah kondisi sosial dan ekonomi menjadi lebih baik. Salah satu KPH di Provinsi Lampung yang memiliki kelompok HKm yaitu KPH Batutegi Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh aspek sosial terhadap pendapatan masyarakat di Gapoktan Karya Tani Mandiri dan Gapoktan Karya Bakti Kabupaten Tanggamus dan menganalisis pengaruh aspek ekonomi terhadap pendapatan masyarakat di Gapoktan Karya Tani Mandiri dan Gapoktan Karya Bakti Kabupaten Tanggamus. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek sosial (variabel bantuan sosial, bantuan bibit, *trust*/kepercayaan, norma) tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan masyarakat di gapoktan Karya Tani Mandiri dan Karya Bakti. Secara Simultan, terdapat pengaruh signifikan pada aspek ekonomi (variabel jumlah tanaman, luas garapan HKm, kepemilikan kendaraan, kepemilikan alat informasi dan komunikasi) terhadap pendapatan masyarakat di gapoktan Karya Tani Mandiri dan Karya Bakti. Variabel yang sangat memengaruhi pendapatan terletak pada variabel luas lahan garapan HKm Karya Tani Mandiri ( $P=0,005$ ) dan Karya Bakti ( $P=0,000$ ), dan variabel kepemilikan alat informasi HKm Karya Bakti ( $P=0,044$ ).

**Kata Kunci:** Perhutanan Sosial, Aspek Sosial, Aspek Ekonomi, HKm, Pendapatan.

## ***ABSTRACT***

### **ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF SOCIO-ECONOMIC ASPECTS IN COMMUNITY FOREST MANAGEMENT ON COMMUNITY INCOME: A CASE STUDY IN KARYA TANI MANDIRI AND KARYA BAKTI, TANGGAMUS DISTRICT, LAMPUNG PROVINCE**

Oleh

**DEWI SRI WAHYUNI**

Community Forest as HKm, is a forest area whose main use is intended to empower the community, the existence of HKM has assisted the community in changing social and economic conditions for the better. One of the KPH in Lampung Province which has a HKm group is Batutegi KPHL, Tanggamus. This study aims to analyze the effect of social aspects on people's income in Gapoktan Karya Tani Mandiri and Gapoktan Karya Bakti, Tanggamus Regency and to analyze the effect of the economic aspect on people's income in Gapoktan Karya Tani Mandiri and Gapoktan Karya Bakti, Tanggamus Regency. The research method used is quantitative method and uses multiple linear regression analysis. The results showed that social aspects (social assistance variables, seed assistance, trust, norms) did not have a significant effect on people's income in the Karya Tani Mandiri and Karya Bakti gapoktan. Simultaneously, there is a significant influence on the economic aspect (variable number of plants, cultivated area of HKm, vehicle ownership, ownership of information and communication tools) on people's income in Gapoktan Karya Tani Mandiri and Karya Bakti. Variables that greatly influenced income were the area of land cultivated by Karya Tani Mandiri (P=0.005) and Karya Bakti (P=0.000), and the variable ownership of HKm Karya Bakti information tools (P=0.044).

***Keyword:*** *Social Forestry, Social Aspects, Economy Aspects, HKm, Income.*

**ANALISIS PENGARUH ASPEK SOSIAL EKONOMI DALAM PENGELOLAAN  
HUTAN KEMASYARAKATAN TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT:  
STUDI KASUS DI GAPOKTAN KARYA TANI MANDIRI DAN KARYA BAKTI  
KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

**DEWI SRI WAHYUNI**

Skripsi

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA  
KEHUTANAN

Pada

Jurusan Kehutanan  
Fakultas Pertanian Universitas Lampung



**JURUSAN KEHUTANAN  
FAKULTAS PERTANIAN  
2023**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi

: **ANALISIS PENGARUH ASPEK SOSIAL EKONOMI DALAM PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT: STUDI KASUS DI GAPOKTAN KARYA TANI MANDIRI DAN KARYA BAKTI KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: **Dewi Sri Wahyuni**

NPM

: 1914151044

Program Studi

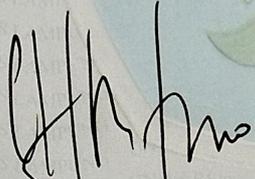
: Kehutanan

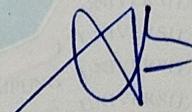
Fakultas

: Pertanian

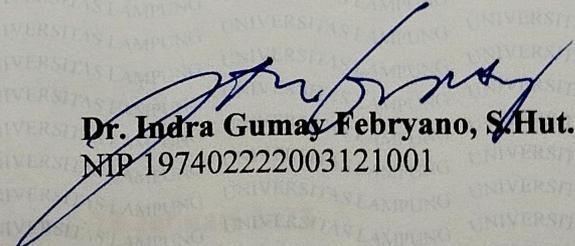
**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

  
**Prof. Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P., IPU.**  
NIP 196412261993032001

  
**Susni Herwanti, S.Hut., M.Si.**  
NIP 198109272006042001

2. Ketua Jurusan Kehutanan

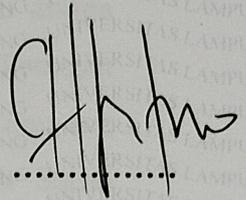
  
**Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si**  
NIP 197402222003121001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

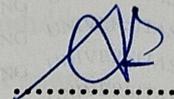
**Ketua**

**: Prof. Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P., IPU**



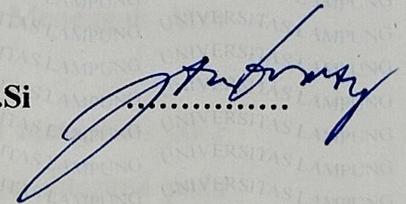
**Sekretaris**

**: Susni Herwanti, S.Hut., M.Si.**



**Anggota**

**: Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si**



**2. Dekan Fakultas Pertanian**



**Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.**  
NIP. 196110201986031002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 Januari 2023**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Sri Wahyuni

NPM : 1914151044

Jurusan : Kehutanan

Alamat Rumah : Dusun Penagan Jaya, Kelurahan Penagan Ratu, Kecamatan Abung Timur,  
Kabupaten Lampung Utara

Menyatakan dengan sebenar-benarnya dan sesungguhnya-sungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“Analisis Pengaruh Aspek Sosial Ekonomi dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan terhadap Pendapatan Masyarakat: Studi Kasus Di Gapoktan Karya Tani Mandiri dan Karya Bakti Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung”**

Adalah benar karya saya sendiri yang saya susun dengan mengikuti norma dan etika akademik yang berlaku. Selanjutnya, saya juga tidak keberatan apabila sebagian atau seluruh data pada skripsi ini digunakan oleh dosen dan/atau program studi untuk kepentingan publikasi. Jika kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana maupun tuntutan hukum.

Bandar Lampung, 15 Februari 2023

Yang membuat pernyataan



**Dewi Sri/Wahyuni**

**NPM 1914151044**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis adalah Dewi Sri Wahyuni yang akrab disapa Dewi. Lahir di Dusun Penagan Jaya, Desa Penagan Ratu, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara pada 14 Mei 2001, anak dari Bapak Sarno Zainuri dengan Ibu Juminah dan merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Riwayat pendidikan Penulis yaitu Sekolah Dasar (SD) di SDN 3 Penagan Ratu Tahun 2007-2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 5 Kotabumi Tahun 2013-2016, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMAN 2 Kotabumi Tahun 2016-2019.

Tahun 2019, Penulis melanjutkan pendidikannya dengan mengikuti jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan diterima pada pilihan kedua yaitu Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa Penulis tidak hanya aktif dalam kegiatan akademik namun juga aktif dalam kegiatan non-akademik. Kegiatan organisasi yang pernah diikuti yaitu Forum Studi Islam Fakultas Pertanian (FOSI FP) Universitas Lampung sebagai Sekretaris Bidang Akademik dan Riset, Forum Komunikasi Bidikmisi/KIP-K Universitas Lampung sebagai Sekretaris Umum, Tutor Forum Ilmiah Mahasiswa FP (Filma Faperta) sebagai Sekretaris Koordinator, dan Himasyilva sebagai Anggota. Adapun dalam kegiatan akademik, Penulis pernah menjadi Asisten Dosen Mata Kuliah Perencanaan Hutan, Asisten Dosen Mata Kuliah Ekosistem Repong Damar, dan Mentor Penulisan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Tahun 2022, Penulis melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kalibening Raya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Pada tahun yang sama penulis melakukan Praktik

Umum (PU) di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Getas, Blora, Jawa Tengah dan KHDTK Wanagama, Gunung Kidul, Yogyakarta atau disebut dengan Hutan Pendidikan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Penulis pernah mengikuti Program Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) yaitu Program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) dengan Mata Kuliah Pengembangan Agropreneur Berbasis *Sustainable Farming* Atsiri di Universitas Syiah Kuala, Aceh. Penulis juga mengikuti Program Perkuliahan *Future Skills* (SFS) yang diselenggarakan oleh Fisipol UGM dengan Mata Kuliah AMAYI (Asosiasi Meditasi, Ayurveda, Yoga Indonesia) dan Mata Kuliah CSR (*Corporate Social Responsibility*) selama 1 semester. Penulis juga berkesempatan menjadi *Awardee Smartscholarship* Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (YBM BRI) dan memperoleh berbagai materi tentang pengembangan diri (*softskill*). Penulis pernah menjadi anggota sebuah proposal yang didanai Universitas Lampung yaitu Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) dengan judul KERISUN (Keripik Sukun) dan Donat Mocaf Siger.

Adapun dalam hal publikasi artikel, Penulis pernah menjadi anggota dalam jurnal pengabdian masyarakat yang sudah *published* berjudul “Penyuluhan Kepada Masyarakat Pekon Pahlungan dalam Pelestarian Repong Damar di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung”, Penulis juga ikut serta dalam presentasi oral publikasi paper pada Seminar Konservasi II dengan judul Strategi “Kemitraan dengan Pihak Swasta dalam Mendukung Kelestarian Hutan Lindung”. Penulis mendapatkan *Letter of Acceptance* (LoA) dalam *International Social Sciences And Innovation Congress* dan *published* abstrak berjudul “*Study of The Effectiveness of Agroforestry Management in Protected Forest Area*” dan “*Analysis of The Influence of Social Aspects in Community Forest Management on Community Income: A Case Study in The Batutege Forest Management Unit, Lampung Province, Indonesia*”.

*Bismillahirrahmanirrahim*  
*Kupersembahkan Karya Ini Untuk Kedua Orang Tua Tercinta, Ayahanda*  
*Sarno Zainuri Dan Ibunda Juminah*

## SANWACANA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Aspek Sosial Ekonomi dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan terhadap Pendapatan Masyarakat: Studi Kasus di Gapoktan Karya Tani Mandiri dan Karya Bakti Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung” dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Kehutanan di Universitas Lampung.

Dengan penuh hormat, Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si., selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Indra Gumay Febryano, S, Hut., M.Si., selaku Ketua Jurusan Kehutanan sekaligus penguji/pembahas pada ujian skripsi ini;
3. Ibu Prof. Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P., IPU., selaku pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Susni Herwanti, S, Hut., M. Si., selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Rusita, S. Hut., M. Si., selaku pembimbing akademik (PA) yang telah membimbing, mengarahkan selama menempuh perkuliahan;
6. Seluruh Bapak Ibu Dosen dan Staff Universitas Lampung terkhusus Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian yang telah membimbing, mengarahkan, memberi semangat dan mendo'akan agar dapat sukses;
7. Pihak PT. Nestle Indonesia yang telah memberikan pembiayaan dan kesempatan untuk melakukan penelitian di Tanggamus;

8. Pihak KPH Batutege yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian pada Gapoktan Karya Tani Mandiri dan Karya Bakti;
9. Seluruh Bapak Ibu Dosen yang tergabung dalam proyek Nestle (Ibu Christine Wulandari, Ibu Novriyanti, Bapak Dian Iswandar, Bapak Indra Gumay Febryano, Ibu Susni Herwanti, Bapak Hari Kaskoyo, Bapak Rahmat Safei, Ibu Yulia Rahma Fitriana, dan Bapak Arief Darmawan) yang ikut serta mendampingi, mengarahkan, dan memberikan semangat serta doa selama melakukan penelitian.
10. Seluruh masyarakat Desa Penantian dan Sinar Banten Kabupaten Tanggamus yang telah memperkenankan kami dalam mengambil data;
11. Bapak Sarno Zainuri dan Ibu Juminah, orang tua kandung Penulis yang selalu memberikan doa dan restu;
12. Kakak-kakak serta keluarga besar Penulis, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
13. Teman-teman seperjuangan Kehutanan Angkatan 2019 (FORMICS) yang selalu memberikan doa dan semangat;
14. Teman-teman seperbimbingan (Yuli Agustin, Eka Ria, Wahyu Edi Candra P., Zalfa Ayudha Putri, dan Putra Pangestu) yang selalu mengingatkan untuk berprogres;
15. Teman-teman satu tim proyek Nestle (Kaifa Uma, Vina Puspita Dewi, Aulia Antarini T., Lilik Fauziah, Putra, Fadela Yunika Sari, Chika Jenita Arsyian, Annisa, M. Irfan Nurrahman, M. Irfandi, Brilian Argha Wiratma) yang telah membantu dalam mengambil data skripsi;
16. Teman-teman organisasi FOSI FP Kabinet “Kreasi Bersinergi”: Isro, Mifta, Abid, Sari, Fatra, Dedi, Ayu T., Bayu, Ayu L, Soleh, Vero, Dimas, Reka, Salsa, Umi, Fatin, Evi, Lika, Nenti dan pengurus lain, tempat untuk berproses;
17. Teman-teman Forkom Bidikmisi/KIP-K Unila “Bergerak Pasti Satu Tujuan”: Kiki, Rani, Oka, Okta, Dimas, Desy, Ajeng, Vina, Mulyati, Novita, Della, Diana, Max, Bella, Putri, Tina dan pengurus lain yang telah memberikan semangat untuk menjadi alumni;

18. Teman dekat Penulis, Endri Lisnawati dan Ikrimah yang senantiasa membantu dalam kesulitan;
19. Seluruh Pihak-pihak terlibat, teman, dan orang-orang baik yang membantu pada kesempatan ini Penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu terima kasih atas doa dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis meminta maaf dan menyadari bahwa di dunia ini tidak ada kata sempurna sama halnya skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diperlukan dan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna bagi ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang. Aamiin.

Bandarlampung, 18 Januari 2023

**Dewi Sri Wahyuni**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	v
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang dan Masalah .....	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	4
1.3 Kerangka Pemikiran .....	4
1.3 Hipotesis .....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	7
2.3 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) .....	11
2.4 Perhutanan Sosial .....	13
2.5 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) .....	16
2.6 Pendapatan Masyarakat .....	17
2.8. Aspek Ekonomi Masyarakat.....	20
2.9 Pengelolaan Lahan dan Jenis Tanaman di KPH Batutegi Tanggamus	20
2.10 Kesejahteraan Masyarakat .....	23
2.11 Kelestarian Hutan .....	24
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	25
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
3.2 Alat dan Objek Penelitian.....	25
3.3 Batasan Penelitian .....	26
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	26
3.4.1 Pengumpulan Data Primer dan Data Sekunder.....	26
3.4.2 Wawancara.....	26
3.4.3 Sampel Penelitian .....	27
3.5 Analisis Data .....	27
3.5.1 Uji Asumsi Klasik.....	30
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	34
4.1 Karakteristik Responden .....	34

4.1.1 Usia Responden .....	34
4.1.2 Tingkat Pendidikan .....	36
4.1.3 Jumlah Tanggungan Responden .....	39
4.1.4 Pekerjaan Sampingan Responden .....	40
4.1.5 Status Responden dalam Gapoktan.....	41
4.1.6 Lama Responden Mengelola HKm.....	42
4.2 Uji Instrumen Penelitian.....	44
4.3 Regresi Berganda Aspek Sosial Ekonomi terhadap Pendapatan.....	48
4 3.2 Analisis Aspek Ekonomi terhadap Pendapatan .....	57
<b>V. SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>66</b>
5.1 Simpulan.....	66
5.2 Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar .....	Halaman
1. Diagram Alir Kerangka pemikiran.....	5
2. Peta Lokasi Penelitian .....	8
3. Diagram Usia Responden Gapoktan Karya Tani mandiri.....	34
4. Diagram Usia Responden Gapoktan Karya Bakti.....	35
5. Tingkat Pendidikan Gapoktan Karya Tani Mandiri.....	37
6. Tingkat Pendidikan Gapoktan Karya Bakti .....	38
7. Jumlah Tanggungan Responden Gapoktan KTM dan KB .....	39
8. Responden Pengelola Gapoktan KTM dan KB .....	41
9. Lama Kelola Lahan HKm pada Gapoktan KTM dan KB.....	43
10. Perbandingan Luas Lahan Garapan antara Gapoktan KTM dan KB.....	63

## DAFTAR TABEL

Tabel .....	Halaman
1. Variabel penduga (predictor), simbolisasi dan pemberian skor dalam Model Sosial Gapoktan KTM dan KB .....	28
2. Variabel penduga (predictor), simbolisasi dan pemberian skor dalam model Ekonomi Gapoktan KTM dan KB.....	29
3. Ketentuan Uji Autokorelasi.....	32
4. Jenis Pekerjaan Sampingan Responden .....	40
5. Hasil Uji Validitas Data Penelitian .....	44
6. Hasil Uji Reabilitas menggunakan Formula Kuder-Richardson.....	45
7. Hasil Uji Kolmogorof-Smirnov .....	46
8. Hasil Uji Multikolinearitas.....	46
9. Hasil Uji Heterokedastisitas .....	47
10. Hasil Uji Autokorelasi (Durbin-Watson).....	48
11. Variabel yang dikeluarkan SPSS .....	48
12. Hasil Koefisien Determinasi Aspek Sosial terhadap Pendapatan KTM ....	49
13. Hasil Uji Linearitas Aspek Sosial terhadap Pendapatan KTM .....	49
14. Hasil Regresi Berganda Aspek Sosial terhadap Pendapatan KTM.....	49
15. Hasil Koefisien Determinasi Aspek Sosial terhadap Pendapatan KB... ..	51
16. Hasil Uji Linearitas Aspek Sosial terhadap Pendapatan pada KB .....	51
17. Hasil Regresi Berganda Aspek Sosial terhadap Pendapatan pada KB.. ....	52
18. Hasil Koefisien Determinasi Aspek Ekonomi terhadap Pendapatan KTM	57
19. Hasil Uji Linearitas Aspek Ekonomi terhadap Pendapatan KTM.....	57
20. Hasil Regresi Berganda Aspek Ekonomi terhadap Pendapatan KTM.. ....	58
21. Hasil Koefisien Determinasi Aspek Ekonomi terhadap Pendapatan KB... ..	60
22. Hasil Uji Linearitas Aspek Ekonomi terhadap Pendapatan KB .....	60
23. Hasil Regresi Berganda Aspek Ekonomi terhadap Pendapatan KB .....	61

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran .....	Halaman
1. Dokumentasi Wawancara.....	79
2. Kuesioner Wawancara .....	81
3. Tabel Durbin Watson .....	84
4. t Tabel.....	85
5. Surat Tugas Turun Lapang.....	86

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang dan Masalah

Indonesia mempunyai kawasan hutan yang kaya akan keanekaragaman hayati (*biodiversity*). Upaya pengelolaan hutan lestari adalah salah satu komitmen pemerintah yang direalisasikan dengan membentuk unit-unit pengelolaan yang lebih kecil yaitu dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Tujuannya untuk pengelolaan hutan yang optimal dan berkelanjutan sesuai dengan sumber daya hutan dan karakteristiknya (Suryandari dan Sylviani, 2012). Taati (2015) menjelaskan bahwa KPH dibentuk untuk mempermudah kegiatan pengelolaan yang meliputi kegiatan perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan. Menurut Sylviani *et al.* (2014), pengelolaan hutan melalui pembentukan KPH adalah usaha untuk mewujudkan pengelolaan hutan berdasar pada tata hutan, rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, dan konservasi. Adapun salah satu program pengelolaan hutan berkelanjutan yaitu program Perhutanan Sosial (PS) (Nurrochmat *et al.*, 2014).

Pengelolaan PS adalah suatu kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok PS melalui Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), kemitraan kehutanan, dan Hutan Adat pada kawasan Hutan Lindung, kawasan Hutan Produksi, dan kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya (KEMENLHK, 2021). Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan PS, HKm adalah kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Realisasi HKm ini menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah terhadap tekanan sumber daya hutan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan

kawasan hutan secara bersama-sama (Zeilika *et al.*, 2021). Menurut Dhruba Bijaya *et al.* (2016), keberadaan HKm telah membantu masyarakat dalam mengubah kondisi sosial dan ekonomi menjadi lebih baik. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja, maka setiap aspek dalam unsur-unsur pengelolaan hutan yang meliputi *planning, organizing, actuating, controlling* (POAC) bersifat strategis (Sanjaya *et al.*, 2017).

Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung telah diimplementasikan di KPH Batuteги Kabupaten Tanggamus dan dialokasikan untuk Gapoktan Karya Tani Mandiri Desa Penantian dan Karya Bakti Desa Sinar Banten. Kegiatan pemberian akses legal kepada masyarakat setempat diantaranya dapat melalui program HKm ini di lahan hutan negara yaitu di bawah naungan KPH Batuteги. Menurut Kaskoyo *et al.* (2017), program HKm bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan yang adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutannya. Studi terkait telah dilakukan Febryano *et al.* (2015), menunjukkan adanya pemanfaatan sumber daya yang tidak adil antar pihak telah menimbulkan degradasi sumber daya hutan dan marginalisasi masyarakat lokal. Sependapat dengan hal tersebut Kaskoyo *et al.* (2014), menyatakan bahwa insentif yang diberikan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam pengelolaan hutan negara dapat meminimalkan konflik penggunaan lahan hutan. Lewerissa (2015), lebih lanjut menyatakan bahwa interaksi masyarakat dengan hutan atau alam dapat dilihat dari aktivitas sosial ekonomi masyarakat desa sekitar hutan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kesejahteraan masyarakat di sekitar HKm dapat diukur dari pendapatan masyarakat. Hal ini sesuai pendapat Inayah (2014), bahwa pendapatan juga sering dijadikan tolak ukur dalam mengukur tingkat kesejahteraan suatu masyarakat dan keberhasilan perekonomian suatu negara. Pendapatan usaha tani terdapat dua unsur yang digunakan yaitu unsur penerimaan dan pengeluaran dari usaha tani tersebut. Semakin besar penerimaan yang diperoleh, maka akan memengaruhi kesejahteraan rumah tangga petani tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang memengaruhi tingkat produksi usaha tani, salah satunya adalah

luas lahan yang sangat memengaruhi naik turunnya jumlah produksi dan faktor sosial dan ekonomi yang lain yaitu jumlah tenaga kerja, serta tingkat pendidikan petani yang akan memengaruhi produktivitas usaha tani (Ferdian, 2019).

Kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat ditentukan dari keadaan atau kondisi sosial ekonomi keluarga. Kondisi sosial ekonomi yang dilihat dari pendapatan memberikan dampak terhadap kesejahteraan. Kondisi sosial ekonomi keluarga merupakan kondisi setiap keluarga dalam masyarakat yang dilihat dari tingkat pendidikan, pendapatan, pekerjaan, dan jumlah anggota keluarga yang dinilai akan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan keluarga dalam ruang lingkup paling kecil di masyarakat (Hanum, 2018). Variabel sosial ekonomi yang menjadi faktor dalam memengaruhi pendapatan petani seperti, luas lahan pertanian, jumlah tenaga kerja keluarga, tingkat pendidikan petani, dan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan keahliannya (Ferdian, 2019).

Penelitian yang relevan dengan aspek sosial ekonomi dalam HKm telah banyak dilakukan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dalam hal ini gapoktan yang mengelola HKm difasilitasi oleh perusahaan dalam mengelola lahan HKm, yaitu Perseroan Terbatas (PT) Nestle Indonesia. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan Nestle, sebuah perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia serta terdepan dalam bidang gizi, kesehatan, dan keafiatan (*nutrition, health, wellness*) (Nestle, 2022). Lebih lanjut PT. Nestle terfokus pada upaya-upaya keberlanjutan lingkungan, sehingga diharapkan adanya bimbingan perusahaan dapat membantu masyarakat sekitar hutan untuk meningkatkan pendapatannya. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan penelitian untuk menganalisis aspek sosial ekonomi yang memengaruhi pendapatan masyarakat, sehingga rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek sosial dapat memengaruhi pendapatan masyarakat di Gapoktan Karya Tani Mandiri dan Gapoktan Karya Bakti Kabupaten Tanggamus.

2. Bagaimana aspek ekonomi dapat memengaruhi pendapatan masyarakat di Gapoktan Karya Tani Mandiri dan Gapoktan Karya Bakti Kabupaten Tanggamus.

## 1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

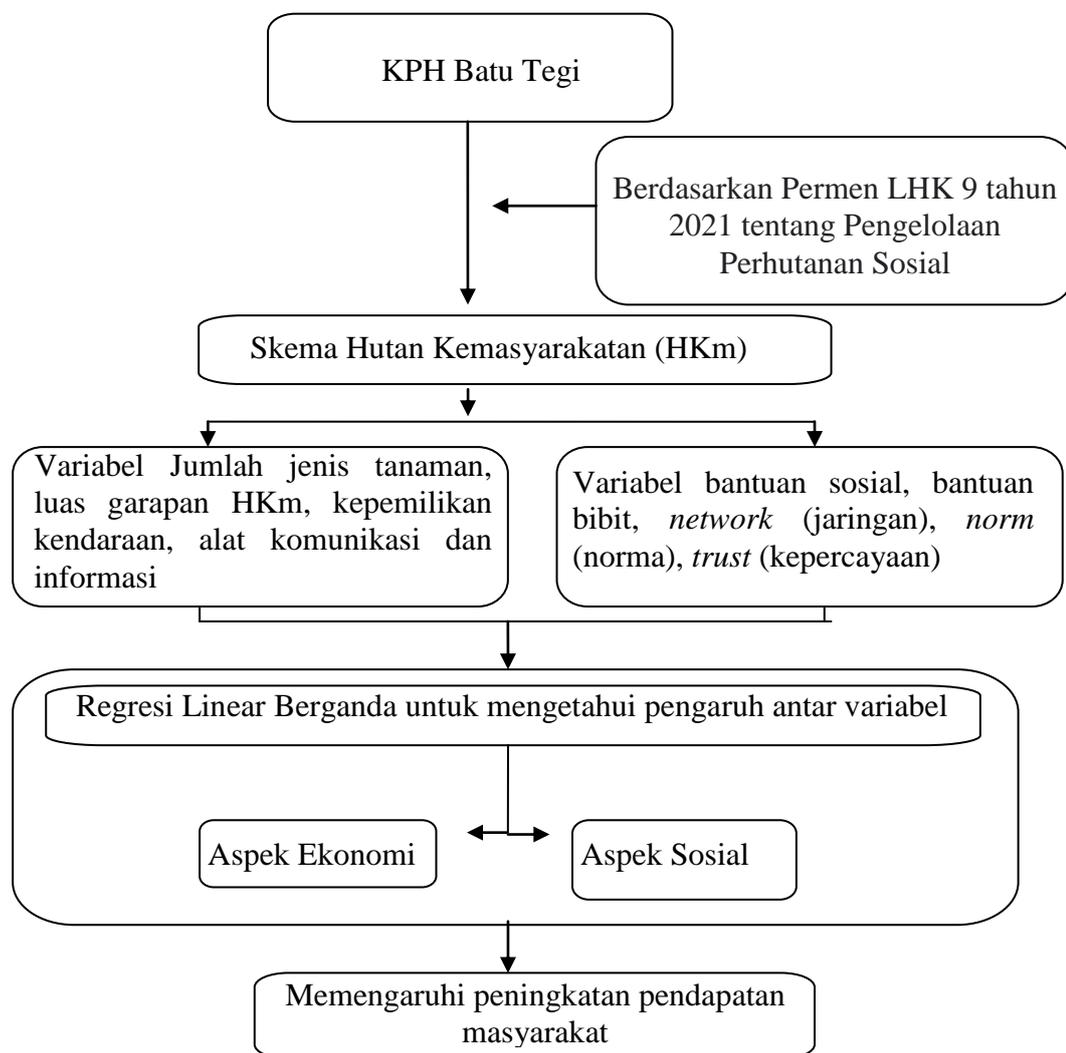
1. Menganalisis pengaruh aspek sosial terhadap pendapatan masyarakat di Gapoktan Karya Tani Mandiri dan Gapoktan Karya Bakti Kabupaten Tanggamus.
2. Menganalisis pengaruh aspek ekonomi terhadap pendapatan masyarakat di Gapoktan Karya Tani Mandiri dan Gapoktan Karya Bakti Kabupaten Tanggamus.

## 1.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian diawali dari pemilihan lokasi yang mengelola lahan garapan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang ada di KPH Batutegei, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung yaitu Gapoktan Karya Tani Mandiri dan Gapoktan Karya Bakti. Skema HKm sebagai suatu inovasi sektor kehutanan dengan memberikan izin kepada perambah hutan untuk mengolah lahan di dalam kawasan hutan dengan perizinan dan syarat-syarat tertentu (Wulandari, 2009). Pendapatan masyarakat di sekitar hutan dapat ditingkatkan melalui keikutsertaannya dalam kelompok HKm dan dapat dinilai melalui peranan aspek sosial dan ekonomi.

Variabel sosial yang diteliti meliputi bantuan sosial, bantuan bibit, jaringan (*network*), norma (*norm*), kepercayaan (*trust*) sesuai dengan penelitian Pulungan *et al.* (2015), kepedulian serta kepercayaan terhadap tetangga dalam menilai tingkat kesejahteraan petani. Nandini *et al.* (2016), menyebutkan aspek sosial meliputi perilaku masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya. Adapun variabel ekonomi yang dikumpulkan dalam penelitian meliputi tingkat pendidikan, umur, status sosial, jumlah tanggungan, pendapatan dan luas lahan garapan, biaya operasional, pendapatan per bulan, pengeluaran rutin per bulan (Nandini *et al.*, 2016). Variabel lain sesuai dengan Pulungan *et al.* (2015), menambahkan variabel kepemilikan alat komunikasi dan kendaraan. Hal ini

sesuai dengan penelitian Kurniawan (2008), bahwa pandangan yang berlaku di kalangan petani adalah bahwa status ekonomi seseorang dalam masyarakat memberikan preferensi pada suatu kegiatan, hak seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, menjadi suatu kegiatan yang sering juga dipengaruhi oleh ekonomi. Setelah itu, analisis aspek sosial ekonomi pada skema HKm menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh antar variabel guna mendapatkan pemahaman yang memengaruhi peningkatan pendapatan masyarakat. Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Alir Kerangka pemikiran.

### 1.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017), hipotesis yakni jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah penelitian sudah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis pada penelitian ini sesuai dengan kerangka pemikiran di atas, jadi penelitian ini mengambil hipotesis atau dugaan sementara yakni:

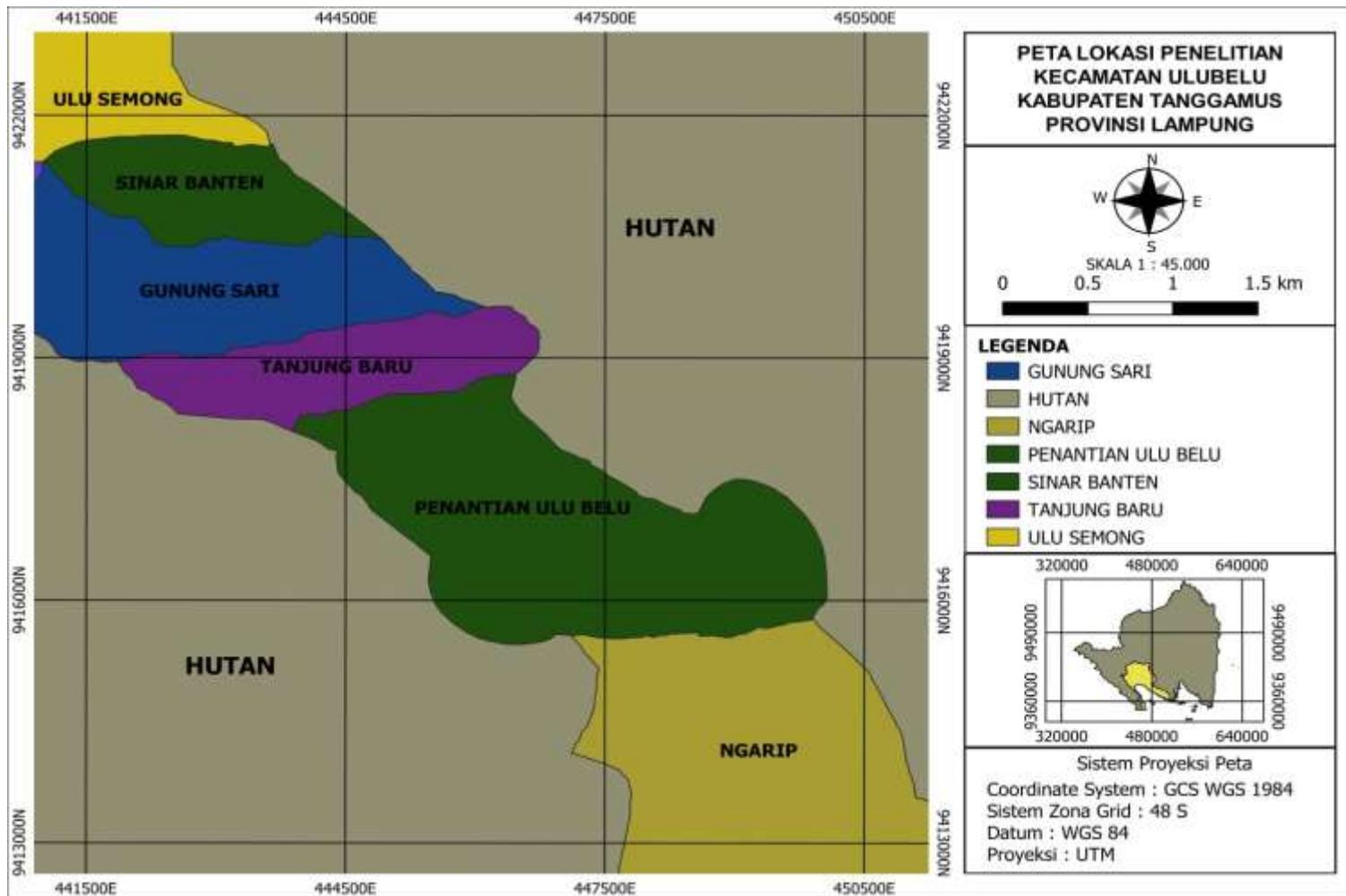
- $H_0$  : Tidak terdapat pengaruh sosial ekonomi terhadap pendapatan di  
kkMasyarakat Gapoktan Karya Tani Mandiri dan Karya Bakti
- $H_1$  : Terdapat pengaruh sosial ekonomi terhadap pendapatan di  
kkMasyarakat Gapoktan Karya Tani Mandiri dan Karya Bakti.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan terletak di Desa Penantian dan Desa Sinar Banten, di mana kedua lokasi ini terdapat Gapoktan Karya Tani Mandiri dan Karya Bakti yang di bawah naungan KPH Batutegi. Secara geografis, terletak pada  $104^{\circ}27'$ - $104^{\circ}54'$  BT dan  $5^{\circ}5'$ - $5^{\circ}22'$  LS. KPH Batutegi mencakup sebagian kawasan Hutan Lindung Register 39 Kota Agung Utara, sebagian kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya dan sebagian kawasan Hutan Lindung Register 32 Bukit Rindingan. KPH Batutegi terletak pada DAS Sekampung yang memiliki 3 sungai utama, yaitu: 1) Way Sekampung mengalir dari pegunungan di sebelah barat, 2) Way Sangharus mengalir dari Gunung Rindingan, dan 3) Way Rilau yang mengalir dari pegunungan sebelah utara. Luas areal kelola KPH Batutegi berdasarkan pada SK Menhut Nomor: SK.68/Menhut-II/2010 tanggal 28 Januari 2010 adalah 58.174 hektar (ha).

Sebagian besar kawasan KPH Batutegi merupakan *cachment area* bendungan Batutegi yang menjadi salah satu area penting di Provinsi Lampung. Areal ini terdiri dari kawasan hutan seluas +35.711 ha (82,28 %) dan areal penggunaan lainnya seluas + 7.693 ha (17,72 %). Adapun batas-batas KPH Batutegi adalah sebelah utara non Hutan (APL) berbatasan dengan KPHL Unit VII, Sebelah selatan non Hutan (APL), Sebelah barat adalah non Hutan (APL) dan KPHL Kota Agung Utara, serta sebelah timur adalah non Hutan (APL) dan KPHL Unit VII. Secara visual, batas wilayah tersebut baru bisa dilihat pada peta karena di lapangan belum dibuat batas definitif yang disepakati oleh para pihak terkait. Padahal batas wilayah kelola merupakan hal penting yang harus ditetapkan di lapangan untuk memberi kepastian kawasan (RPHJP KPH Batutegi, 2014).



Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian.

### **2.1.1 Desa Penantian, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus**

Penantian adalah desa/kelurahan yang terletak di Kecamatan Ulu Belu Provinsi Lampung memiliki Kode Pos 35664. Jarak pekan penantian dengan ibu kota kabupaten +-70 km, jarak ke ibu kota ke kecamatan +-9 km, sedangkan jarak ke ibu kota provinsi +-145 km. Secara geografis, luas wilayah pekan penantian adalah 697 ha, yang berada 1000 kaki di atas permukaan air laut. Batas-batas Desa Penantian yaitu sebelah utara berbatasan dengan pekan Datar Lebuay Kec. Air Naningan, sebelah selatan berbatasan dengan Kota Agung Utara Kec. Kota Agung, sebelah timur berbatasan dengan Pekan Ngarip Kec. Ulu Belu, dan di sebelah barat berbatasan langsung dengan pekan tanjung Baru Kec. Ulu Belu (Profil Desa Penantian, 2022).

Letak topografis tanah desa penantian berbentuk kontur tanah yang lereng dan berbukit, maka sebagian besar masyarakat memanfaatkan tanah sebagai lahan perkebunan kopi. Jumlah penduduk pekan penantian sebanyak 2221 jiwa dengan jumlah keseluruhan kepala keluarga adalah 661 kepala keluarga. Pekan Penantian telah memiliki lembaga masyarakat desa berupa, BHP, PKK, Karang taruna, Kelompok Tani, RT, RW, dan Kelompok Seni. Struktur organisasi dan tata kerja pada pekan penantian memiliki dua kepala urusan, dan dua kepala seksi serta lima kepala dusun. Pekan penantian telah memiliki fasilitas lapangan desa di bidang pendidikan berupa 2 sekolah dasar, 2 TK, dan 2 Paud (Profil Desa Penantian, 2022).

### **2.1.2 Desa Sinar Banten, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus**

Sinar Banten adalah salah satu desa/kelurahan di Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Sinar Banten mempunyai kode wilayah menurut Kemendagri RI yaitu 18.06.15.2014. Kode pos Desa Sinar Banten adalah 35387. Secara geografis, luas wilayah Desa Sinar Banten adalah 122 ha, yang berada 1000 kaki di atas permukaan air laut. Jumlah penduduk Desa Sinar Banten yaitu sekitar 450 Jiwa. Kondisi geografis Desa Sinar Banten yaitu permukiman yang dikelilingi dengan batas sungai. Luas Wilayah Desa Sinar Banten kurang lebih 54 ha (Profil Desa Sinar Banten, 2022).

Pada umumnya masyarakat setempat menyebut Desa Sinar Banten dengan sebutan Pekon Sinar Banten. Masyarakat Pekon Sinar Banten masih kental dengan budaya setempat dan tradisi-tradisi masih dijalankan. Tenaga kesehatan lebih dari 40 orang yang meliputi kader posyandu Balita, posyandu Lansia, dan anemia pada ibu hamil. Penyuluhan terkait kesehatan sering dilakukan agar masyarakat Sinar Banten terjamin kesehatannya. Pelatihan-pelatihan terkait seperti pemberdayaan masyarakat juga dilakukan untuk mendukung partisipasi masyarakat agar sejahtera (Profil Desa Sinar Banten, 2022).

## **2.2 Kawasan Hutan**

Indonesia memiliki bentangan wilayah hutan yang cukup besar berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas hutan di Indonesia adalah 125.797.052 ha. Arti hutan adalah suatu kawasan yang cukup luas yang di dalamnya tumbuh kayu dan segala isinya, baik tumbuhan maupun hewan, dan secara keseluruhan merupakan suatu komunitas yang hidup yang mampu memberikan manfaat lain secara lestari (Armiwal, 2019). Hutan secara ekosistem memiliki berbagai macam hal yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu: fungsi konservasi; fungsi lindung; dan fungsi produksi. Hutan produksi adalah kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Redi (2014) menjelaskan bahwa pengelolaan hutan meliputi yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan pembentukan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, reklamasi dan rehabilitasi hutan, serta perlindungan hutan dan alam. Pengelolaan hutan dirancang untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Bertambahnya manusia juga menjadi salah satu unsur penyebab adanya berkurangnya baku mutu ekosistem yang ada, khususnya di beberapa lingkungan yang secara langsung bedekatan dengan aktivitas manusia tersebut. Pengelolaan hutan sendiri tidak mungkin dan mustahil dilakukan oleh negara sendiri, maka perlu partisipasi masyarakat dalam menjaga, merawat dan mengelola hutan itu sendiri (Saputri, 2017). Selama pengelolaan hutan, negara sudah mengeluarkan beberapa pola pengelolaan hutan salah satunya dengan adanya pengelolaan melalui perhutanan sosial. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 83AD menjelaskan bahwa Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan di hutan rakyat atau hutan hak atau hutan adat, berupa hutan pedesaan, di mana masyarakat hukum setempat atau masyarakat hukum adat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dinamika sosial budaya, hutan rakyat, hutan adat, dan perusahaan hutan (Menteri Lingkungan Hidup, 2016).

### **2.3 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)**

Pada Peraturan Menteri Menteri Kehutanan No. P6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan menyebutkan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Pengelolaan hutan secara lestari dapat diwujudkan dengan membagi habis seluruh kawasan hutan ke dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan baik Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), maupun Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) (Ruhimat, 2010).

Membangun unit pengelolaan dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada tingkat tapak merupakan salah satu hal mendasar untuk mewujudkan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah mengelola

sumber daya hutan. Unit pengelolaan KPH tersebut perlu didesain sedemikian rupa sesuai situasi lapangan sehingga pembangunan KPH dapat menjadi kondisi pemungkin (*enabling conditions*) dicapainya pengelolaan hutan secara berkelanjutan. KPHP dibentuk tidak menggantikan lembaga kehutanan di daerah, melainkan menguatkan fungsi lembaga kehutanan di daerah. Oleh karena itu pembentukan KPH didasarkan pada proses yang dapat mengakomodasikan kekhasan dan aspirasi daerah, penetapan tujuan usaha, karakteristik sumber daya hutan, batas administrasi wilayah, serta kapasitas dan kapabilitas lembaga yang akan terlibat (Supratman, 2009).

Kesatuan pengelolaan hutan sebagai salah satu organisasi di tingkat tapak memiliki informasi kondisi biofisik hutan, kondisi sosial budaya masyarakat, potensi dan persoalan, termasuk konflik di dalamnya, sejarah penguasaan lahan, serta siapa yang menguasai lahan (Ekawati, 2014). Oleh karena itu sikap KPH terhadap PS menentukan keberhasilan intervensi pemerintah terhadap pelaksanaan PS. Sebelumnya telah terdapat kajian tentang peran KPH dalam PS dari segi peraturan perundangan (Sahide *et al.*, 2016) maupun kajian mengenai birokrasi dan perubahan paradigma pengelola hutan dari sudut pandang aparatnya sendiri, namun belum terdapat kajian mengenai kesediaan dan peran KPH dalam implementasi program PS, terutama melalui sudut pandang para pihak yang terlibat dalam PS.

Proses pembangunan kelembagaan PS di KPH masih dalam tahap awal seiring dengan operasionalisasi KPH. Peran KPH adalah untuk menjaga kelembagaan pengelolaan hutan kolektif yang telah ada di dalam masyarakat atau menumbuhkan kelembagaan yang belum terbentuk. Pada tahap awal ini, kedua KPH menganggap penting bagi masyarakat untuk mendapatkan legalitas lahan yang dikelola. Hal ini sejalan dengan berbagai penelitian bahwa keamanan hak properti seperti lahan dan pohon penting untuk keberhasilan PS (Cronkleton *et al.*, 2012). Proses pengajuan izin PS membuka akses masyarakat terhadap informasi terkait hutan dan pengambilan keputusan, walaupun tingkat keterbukaan informasi dan proses pengambilan keputusan bervariasi antar PS. Dengan diperolehnya izin PS, akses terhadap lahan hutan dan sumber daya yang ada di dalamnya menjadi legal dan masyarakat dapat memutuskan pengembangan usaha

yang akan dilakukan dengan rambu-rambu yang tetap perlu diingatkan oleh KPH (Fitria, 2021).

## **2.4 Perhutanan Sosial**

Secara legal formal terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial menyempurnakan kebijakan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Kebijakan ini menyelaraskan peraturan-peraturan sebelumnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) Volume 1 Nomor 1, Juni 2021 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/ Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman. Salah satu pertimbangan terbitnya peraturan tersebut adalah mendesaknya upaya untuk mempercepat pengurangan kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan pengelolaan atau pemanfaatan kawasan hutan. Kebijakan ini merupakan resonansi antara pendekatan pelaksanaan terpusat dan inisiatif yang datang dari bawah, dukungan dari pemerintah daerah serta partisipasi dari masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya (Mahardika *et al.*, 2021)

Perhutanan sosial dirintis sudah sejak lama melalui berbagai bentuk kegiatan, yaitu berupa program tumpangsari di Perhutani, maupun PMDH oleh HPH/HTI. Pasca Orde Baru, pemerintah pusat semakin membuka ruang untuk hak yang lebih besar bagi masyarakat lokal melalui Undang-Undang tentang

Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Selanjutnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 tahun 2012, wilayah adat diakui dan bukan menjadi bagian dari kawasan hutan negara. Tindak lanjut pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial sebagai revisi atas peraturan-peraturan program perhutanan sosial sebelumnya. Permen LHK ini dijelaskan secara rinci mengenai skema perhutanan sosial, mulai dari penyederhanaan mekanisme proses usulan sampai dengan terbitnya izin. Terbitnya peraturan perhutanan sosial dan adanya beberapa perubahan kebijakan diharapkan dapat merealisasikan target RPJMN tahun 2015-2019 di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo terkait pemberian akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat seluas 12,7 juta ha. Mengingat program perhutanan sosial ini mempunyai kontribusi terhadap perekonomian nasional melalui pengurangan kemiskinan pada tingkat rumah tangga kelompok tani pengelola perhutanan sosial (Susilo *et al.*, 2019).

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan. Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial melalui Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, HTR, kemitraan kehutanan, dan hutan adat pada kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi atau kawasan hutan konservasi sesuai dengan fungsinya (KEMENLHK, 2021). Pelaksanaan perhutanan sosial juga merupakan salah satu upaya meningkatkan produktivitas kawasan hutan ditinjau dari aspek hasil kayu untuk perum perhutani dan hasil non kayu untuk masyarakat di sekitar hutan maupun untuk menjaga kelestarian dan perlindungan alam serta lingkungan hidup (Jumanto dan Martono, 2020).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial menyebutkan Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok Masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat. Pendapat Sanjaya *et al.* (2017), menyatakan bahwa penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari guna penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta untuk menyelesaikan persoalan sosial.

HKm bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan 7 sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Persetujuan Pengelolaan HKm adalah akses legal yang diberikan oleh menteri kepada perorangan, kelompok tani, gabungan kelompok tani hutan atau koperasi masyarakat setempat untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi (KEMENLHK, 2021). Adanya masalah dapat diminalisir dengan program Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang saat ini telah diterapkan diberbagai daerah. HKm merupakan kolaborasi antara kegiatan perlindungan, produksi hutan yang lestari serta kesejahteraan masyarakat sekitar hutan (Arifandy dan Sihaloho, 2016). HKm melarang petani melakukan penanaman dengan pola monokultur akan tetapi diarahkan untuk melakukan penanaman dengan pola polikultur atau agroforestri. Penerapan agroforestri pada suatu lahan dapat memenuhi kebutuhan pangan manusia serta mempertahankan keberadaan hutan. Hal ini dikarenakan penanaman dilakukan dengan menggabungkan jenis tanaman pertanian dan kehutanan pada

satu areal lahan sehingga terciptanya produksi lestari bersama masyarakat yang sejahtera (Mayrowani dan Ashari, 2016).

Manfaat dari hutan kemasyarakatan bagi masyarakat yaitu: Pemberian izin kelola HKm memberikan kepastian hak akses untuk turut mengelola kawasan hutan. Masyarakat atau kelompok tani HKm menjadi pasti untuk berinvestasi dalam kawasan hutan melalui reboisasi swadaya mereka, menjadi sumber mata pencarian dengan memanfaatkan hasil dari kawasan hutan. Keanekaragaman tanaman yang diwajibkan dalam kegiatan HKm menjadikan kalender musim panen petani menjadi padat dan dapat menutupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga petani HKm, Kegiatan pengelolaan HKm yang juga menjaga sumber-sumber mata air dengan dengan prinsip lindung, berdampak pada terjaganya ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rumah tangga dan kebutuhan pertanian lainnya, Terjalannya hubungan dialogis dan harmonis dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya. Diskusi-diskusi dan komunikasi yang dibangun dan dilakukan melalui kegiatan HKm telah menghasilkan komunikasi yang baik dan harmonis antar para pihak, yang dulu merupakan sesuatu hal yang jarang ditemukan, dan adanya peningkatan pendapatan non tunai (berbentuk barang) dalam bentuk pangan dan papan (Cahyaningsih, 2006).

## **2.5 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)**

Pengelolaan HKm akan berjalan dengan baik melalui sebuah wadah yaitu berupa kelompok tani/ kelompok tani hutan. Kelompok tani merupakan sebuah kelembagaan di tingkat petani yang secara langsung berperan dalam kegiatannya mengembangkan unit usaha secara bersama dan di dalamnya terjadi interaksi dan koordinasi antar anggota sehingga tujuan bersama akan cepat tercapai. Keberadaan kelembagaan kelompok tani dijadikan suatu wadah oleh anggota kelompok dalam menjalankan suatu program dimana kelompok memiliki aturan main dalam mengelola dan menggarap lahan HKm. Keberadaan gapoktan seharusnya dapat memberikan dampak positif bagi anggota dan keberadaan hutan itu sendiri. Masyarakat tetap dapat memperoleh peningkatan pendapatan dari pemanfaatan keberadaan lahan HKm dengan tetap memperhatikan kelestarian lahan HKm itu sendiri (Safe'I, 2018).

Hamilton *et al.* (2015) mengemukakan bahwa kelompok tani sebagai wadah kerja sama dapat membuat petani menjadi bertambah kuat. Kondisi ini juga didukung Frese dan Gielnik (2014), bahwa kelembagaan petani dan tindakan kolektif sering dilihat sebagai faktor kunci dalam meningkatkan akses petani. Kelompok tani merupakan komunitas nyata. Komunitas nyata seperti yang disampaikan Secundo *et al.* (2017), bahwa inspirasi berusaha menjadi wirausahawan dapat melalui proses belajar di komunitas yang melibatkan pengusaha, ahli dan pembelajar dalam kelompok belajar. Komunitas nyata adalah individu lain dapat teman sejawat, mentor, fasilitator yang bertatap muka secara langsung. Melalui pembinaan desa mitra, generasi muda mengenal usaha pertanian, kemudian mendapatkan pengetahuan. Melalui fasilitator dan praktisi sebagai komunitas nyata, tidak hanya pengetahuan melainkan juga dapat ikut terlibat langsung praktik sehingga mendapat keterampilan (Secundo *et al.*, 2017; Sankaran dan Demangeot, 2017; Anwarudin *et al.*, 2018).

## **2.6 Pendapatan Masyarakat**

Berdasarkan model ekonomi dengan diagram *circular flow* pengertian pendapatan masyarakat adalah seluruh balas jasa yang diterima oleh masyarakat dari faktor-faktor produksi yang digunakan, yaitu sewa, bunga, upah dan laba (Murni, 2006). Menurut Tarigan (2004), tingkat pendapatan dapat diukur dari total pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut. Ada beberapa parameter yang bisa digunakan untuk mengukur adanya pembangunan wilayah. Salah satu parameter terpenting adalah meningkatnya pendapatan masyarakat. Parameter lain, seperti peningkatan lapangan kerja dan pemerataan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan juga sangat terkait dengan peningkatan pendapatan wilayah. Pendapatan wilayah haruslah bersangkut paut dengan peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut, yaitu yang dimaksud adalah pendapatan rata-rata (*income percapita*) masyarakat, untuk itu perlu diketahui alat ukur dan metode yang dipakai untuk menetapkan besarnya tingkat pendapatan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satu indikatornya ditunjukkan oleh meningkatnya pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan tersebut akan mendorong masyarakat untuk melakukan pengeluaran

konsumsi yang lebih tinggi, yang secara makro akan berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pengeluaran konsumsi masyarakat akan mendorong sektor real untuk bertumbuh, dengan memproduksi segala macam kebutuhan masyarakat, yang berarti bahwa aktivitas ekonomi masyarakat juga akan semakin berkembang. Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat, maka semakin banyak jenis kebutuhan yang diinginkan sehingga pihak produsen juga harus mengimbangnya dengan memproduksi produk-produk yang semakin beragam.

Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan mencerminkan suatu sifat keterbatasan sumber daya keluarga atau pendapatan yang tersedia akan memengaruhi adanya prioritas alokasi pengeluaran keluarga. Keluarga yang berpenghasilan rendah, sebagian besar pendapatannya digunakan untuk mencukupi kebutuhan pangan, sehingga persentase pengeluaran untuk pangan akan relatif besar. Peningkatan pendapatan berpengaruh besar terhadap usaha yang dijalankan oleh sebuah rumah tangga, karena pendapatan digunakan dalam kegiatankegiatan lainnya yang bersifat produktif demi kesejahteraan rumah tangga miskin (Putrayasa, 2018).

## **2.7 Aspek Sosial Masyarakat**

Pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat dipengaruhi oleh modal kolektif yang dimiliki, salah satunya modal sosial (Achmad and Zunariyah, 2015). Modal sosial (*social capital*) adalah nilai-nilai atau norma-norma masyarakat dalam mengelola hutan dengan kerja sama demi mencapai kebutuhan yang berkelanjutan. Modal sosial merupakan aspek penting untuk membangun pertanian yang lebih maju (Harahap dan Herman, 2017). Modal sosial masyarakat seperti kepercayaan, gotong royong, jaringan dan sikap, berperan besar terhadap perilaku masyarakat dan bila dikelola dengan baik akan mampu memberdayakan masyarakat (Thobias, 2013). Modal sosial merupakan strategi yang baik digunakan untuk pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat, terutama dalam pengembangan ekonomi pedesaan (Nababan *et al.*, 2016). Modal sosial merupakan norma dan nilai bersama yang dibangkitkan oleh kepercayaan (*trust*),

di mana trust merupakan dasar bagi sikap keteraturan, kejujuran, dan perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas masyarakat (Cahyono dan Adhiatma, 2012). Aksi kolektif masyarakat dapat terfasilitasi oleh modal sosial dan memberikan pengaruh yang kuat pada proses peningkatan kesejahteraan sosial (Qurniati *et al.*, 2017).

Apabila modal sosial kuat, maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam mendukung program pembangunan. Modal sosial yang tinggi akan berdampak pada tingginya partisipasi masyarakat, sehingga pemerintah akan memiliki akuntabilitas yang lebih kuat (Ekawati dan Nurrochmat, 2014). Penerapan modal sosial yang baik akan mampu memberdayakan masyarakat dan sangat berpengaruh dalam keberhasilan pengelolaan sumber daya alam yang lestari (Nurrochmat *et al.*, 2016; Pranadji, 2016). Tingkat modal sosial dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat secara lestari dapat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dan kelembagaan lokalnya (Febryano *et al.*, 2014). Partisipasi masyarakat juga dapat mempertahankan kelestarian sumber daya hutan dengan menerapkan modal budaya dan pengetahuan lokal (Salampessy *et al.*, 2015). Laura *et al.* (2018), melaporkan bahwa masyarakat Dusun Limang membangun struktur perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan dan pengelolaan potensi alam sebagai strategi bertahan hidup dengan memanfaatkan modal sosial masyarakat untuk memperbaiki kondisi ekonomi menjadi lebih sejahtera.

Modal sosial adalah sumber daya sosial yang bermanfaat dan digunakan masyarakat untuk mencapai tujuan penghidupan mereka. Perubahan modal sosial terdiri dari organisasi, jaringan sosial, tingkat kepercayaan dan gotong royong (Ayu, 2022). Norm maupun trust merupakan aset modal sosial yang sangat penting untuk membangun tatanan kelembagaan yang efektif, yang menjadi prasyarat bagi keberlanjutan sistem perekonomian industri dan jasa-jasa. Apabila kedua unsur ini baik maka akan menjadi landasan bagi setiap individu untuk melakukan hubungan sosial satu sama lain, yang berarti kinerja berjejaring (*networking*) juga akan berkembang dengan sendirinya (Bakri, 2021). Kekuatan modal sosial ini akan mendorong berlangsungnya berbagai jenis transaksi, yang menstimulasi peningkatan pendapatan, menekan biaya-biaya transaksi

(*transaction cost*) sekaligus menurunkan biaya pertukaran (*exchange cost*), menekan *free rider*, memfasilitasi dan mendorong berbagai bentuk kerjasama (Bakri *et al.*, 2014; Bakri, 2021). Dengan begitu kemitraan dengan berbagai pihak juga optimis untuk dikembangkan, termasuk kemitraan dalam pengembangan agrosilvopastura sapi yang dapat diskenariokan sebagai model pemberdayaan masyarakat agroforestry perambah hutan dalam rangka mengurangi atau membebaskan lahan hutan dari perambahan.

## **2.8. Aspek Ekonomi Masyarakat**

Pemahaman tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan perlu diketahui untuk mengetahui sejauh mana pengaruh keberadaan masyarakat terhadap kualitas hutannya. Mengetahui kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar hutan merupakan suatu kajian yang perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang hubungan dan pengaruh keberadaan hutan serta fungsinya terhadap kehidupan masyarakat di sekitar hutannya termasuk untuk membuat rencana atau evaluasi kegiatan pengelolaan hutan

Pendidikan formal pada penelitian ini dapat memengaruhi tingkat berpikir dan penalarannya dalam mengambil keputusan maupun dalam bertindak. Bagi seorang pemuda tani, pengetahuan, sikap positif dan keterampilan yang tinggi akan menjadikan dirinya mampu mencari solusi dalam permasalahan usahatani, serta lebih adaptif terhadap perubahan dan mampu mengatasi masalah dengan baik serta merencanakan dan mengevaluasinya secara tepat. Hal yang sama telah dikemukakan Herawati (2018), bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan memengaruhi cara berpikir, sikap dan perilakunya ke arah yang lebih rasional dalam menerima dan memahami inovasi teknologi yang diperolehnya

## **2.9 Pengelolaan Lahan dan Jenis Tanaman di KPH Batutegei Tanggamus**

Pengelolaan areal kerja HKm menerapkan sistem yang memadukan berbagai jenis tanaman dalam satu lahan atau dikenal dengan istilah agroforestri. Menurut Mbow *et al.* (2014) dalam pengelolaan hasil yang kompleks ini, praktik pertanian dan pengelolaan lahan merupakan kunci bagi agroforestri berkelanjutan.

Coe *et al.* (2014) mengemukakan tentang pilihan-pilihan dalam pengelolaan agroforestri yang harus sesuai dengan konteks ekologi dan sosial yang beragam di berbagai tempat. Hal ini didukung oleh Wulandari *et al.* (2014) menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat di sekitar hutan dapat mengoptimalkan lahan hutan dengan menerapkan agroforestri berbasis kondisi sosial ekonomi masyarakat, seperti preferensi masyarakat dan adopsi pola agroforestri.

Agroforestri merupakan salah satu bentuk penggunaan lahan secara multi tajuk yang terdiri dari campuran pepohonan (tanaman kehutanan) dengan tanaman semusim dalam satu bidang lahan (Olivi *et al.*, 2015). Nawir *et al.* (2017), menyatakan bahwa agroforestri adalah pola usaha tani produktif yang tidak saja mengetengahkan kaidah konservasi tetapi juga untung dan manfaat yang dapat diperoleh masyarakat. Salah satu yang menjadi peluang besar untuk mengupayakan kelestarian hutan di Indonesia adalah dengan hadirnya skema-skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat, karena kita ketahuai bahwa kelestarian dari suatu hutan tidak lepas dari peran masyarakat yang ada di sekitar hutan (Samsu, 2019).

Agroforestri adalah lahan budidaya yang perlu dilestarikan untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati. Dengan semakin meningkatnya pemanfaatan lahan-lahan alamiah (hutan) untuk peruntukan lainnya, agroforestri diharapkan dapat menjadi salah satu penyangga kehidupan untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Agroforestri adalah tipe pemanfaatan lahan pertanian dengan struktur dan komposisi yang mendekati struktur dan komposisi ekosistem hutan (Hakim, 2021).

Sistem agroforestri diharapkan dapat mengoptimalkan produktivitas lahan sehingga masyarakat dapat memanen hasilnya secara kontinyu; tergantung seberapa banyak variasi jenis yang dikombinasikan dalam satu lahan dan sistem pengelolaannya. Pemilihan komposisi jenis tanaman dan cara pengelolaannya menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan sistem agroforestri ini. Sistem agroforestri yang telah dilakukan di areal kerja HKm diharapkan mampu memulihkan fungsi hutan sekaligus berkontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani (Puspasari, 2017).

Agroforestri yang membentang luas di sekitar kawasan lindung memainkan peran penting sebagai buffer strategis antara kawasan konservasi dan kawasan budidaya. Secara fisik, buffer zone bertindak sebagai penyangga dan pembatas gangguan manusia terhadap kawasan lindung. Daerah penyangga juga berfungsi untuk melindungi kawasan inti dari introduksi jenis-jenis spesies eksotik yang tumbuh dan tersebar di permukiman agar tidak masuk ke hutan. Secara sosial, buffer zone memberikan peluang ekonomi yang diharapkan dapat mengurangi tekanan eksploitasi masyarakat di sekitar hutan.

Agroforestri telah diketahui memberikan dukungan penting bagi konservasi keanekaragaman hayati. Konservasi keanekaragaman hayati saat ini disepakati penting dan perlu terus menerus dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan di planet bumi. Degradasi habitat dan punahnya bentuk bentuk kehidupan adalah kejadian buruk dan berdampak negatif pada manusia. Para peneliti menjelaskan bahwa secara mendasar agroforestri memberikan peran dan dukungan konservasi keanekaragaman hayati lewat beberapa proses dan mekanisme dasar (Jose, 2012), meliputi antara lain:

- Agroforestri menyediakan tempat bagi tumbuh dan berkembangnya anekaragam spesies tanaman
- Agroforestri menyediakan habitat bagi beragam spesies yang toleran terhadap gangguan-gangguan pada level tertentu, meliputi antara lain berbagai jenis burung
- Agroforestri membantu preservasi bibit-bibit tanaman, khususnya spesies-spesies sensitive
- Agroforestri membantu mengurangi laju konversi/perubahan habitat alamiah dengan menyediakan lahan lahan yang lebih produktif, alternative pertanian berkelanjutan dan menghindari penggundulan hutan untuk menyediakan lahan pertanian
- Agroforestri memberikan peran konektifitas dengan menciptakan koridor-koridor habitat yang memungkinkan terciptanya integritas ekosistem pada area yang telah terfragmentasi

- Agroforestri membantu konservasi keanekaragaman hayati dengan memberikan layanan ekosistem pendukung penting, seperti mencegah erosi, hilangnya bahan organik tanah dan sebagainya
- Agroforestri menyediakan habitat ideal bagi beragam hewan tanah yang berperan penting dalam dekomposisi bahan-bahan seresah dan bahan organik.

### **2.10 Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan sosial adalah kondisi di mana masyarakat mampu memenuhi kebutuhan, dan menjalani kehidupan dengan aman dan damai dengan menjunjung tinggi nilai kesusilaan, rasa keselamatan, ketenteraman lahir dan batin. Di mana kondisi warga negara mampu memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat (Amelia, 2022). Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2).

Pendapatan dan kepemilikan aset merupakan faktor internal yang memengaruhi tingkat kesejahteraan. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Keluarga yang memiliki pendapatan yang tinggi memiliki peluang yang besar untuk sejahtera dibandingkan keluarga dengan pendapatan yang rendah. Pendapatan akan menentukan daya beli terhadap pangan dan fasilitas lainnya seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dll. Selain itu, keluarga yang memiliki aset lebih sejahtera dibandingkan keluarga yang tidak memiliki aset.

Pengelolaan Sumber daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) menyertakan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. PHBM ini merupakan upaya dalam membangun kerja sama sinergis antara masyarakat dan pemerintah dalam mengelola sumber daya hutan. Diharapkan dari pola pengelolaan ini, masyarakat

tidak lagi merasa sebagai objek di dalam pengelolaan sumber daya hutan. Untuk itu perlu selalu dibangun komitmen, kepercayaan dan kejujuran antar pihak sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Pada akhirnya akan tercapai maksud dan tujuan model PHBM yaitu terwujudnya kelestarian dan keberlanjutan fungsi hutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat (Damayatanti, 2011). Pemanfaatan SDH melalui PHBM dapat bertahan lama karena mekanismenya memperhatikan prinsip keadilan untuk semua warga sehingga menumbuhkan rasa saling percaya, hubungan saling percaya akan tumbuh ketika proses-proses sosial dalam pengelolaan hutan memberikan jaminan keadilan bagi semua pihak. Mekanisme pengorganisasiannya juga membuka partisipasi sederajat antar warga, di samping itu ada aturan yang jelas dan dipatuhi bersama tentang ganjaran dan sanksi yang harus dilaksanakan secara konsisten (Zaenuddin, 2014).

## **2.11 Kelestarian Hutan**

Hutan mempunyai sifat khusus yang sangat khas yaitu dapat dikelola secara lestari dan dapat diperbaharui atau dipulihkan kembali. Salah satu elemen penting dalam pengelolaan hutan adalah konsep pelestarian, khususnya menyangkut kelestarian hasil hutan. Pelestarian dalam pengertian yang luas merupakan salah satu penerapan yang penting dari sistem ekologi. Tujuan dari pelestarian yang sebenarnya adalah memastikan pengawetan kualitas lingkungan yang mengindahkan estetika dan kebutuhan maupun hasilnya serta memastikan kelanjutan hasil tanaman, hewan, bahan-bahan yang berguna dengan menciptakan siklus seimbang antara panen dan pembaharuan (Damayatanti, 2011). Pelestarian hutan merupakan upaya melindungi hutan dari kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit. Pelestarian hutan dimaksudkan untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan (Ahada, 2020).

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Gapoktan Karya Tani Mandiri (KTM) dan Gapoktan Karya Bakti (KB), Desa Penantian dan Desa Sinar Banten, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung yang merupakan areal HKm di bawah KPH Batuteги. Secara geografis terletak pada  $104^{\circ}27'$  -  $104^{\circ}54'$  BT dan  $5^{\circ}5'$  -  $5^{\circ}22'$  LS. Lokasi tersebut secara sengaja dipilih (*purposive*) untuk mengetahui pengaruh aspek sosial ekonomi terhadap pendapatan masyarakat penggarap lahan di kawasan hutan lindung. Waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu pada bulan Oktober-November tahun 2022.

#### **3.2 Alat dan Objek Penelitian**

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis untuk mencatat hasil wawancara kepada responden, kamera untuk mengambil gambar atau mendokumentasikan kegiatan, dan laptop yang telah terinstal *microsoft office* serta *Statistical Package for the Social Sciences* atau IBM SPSS versi 25 untuk mengolah data hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun bahan dalam penelitian yaitu lembar kuesioner responden untuk melakukan wawancara kepada para petani HKm. Objek penelitian yaitu masyarakat petani di Gapoktan KTM dan KB untuk mendapatkan informasi mengenai penghasilan dari lahan yang dikelola, gambaran keadaan secara umum, serta faktor-faktor sosial dan ekonomi petani.

### **3.3 Batasan Penelitian**

Batasan penelitian ini adalah responden, yaitu banyaknya responden yang diwawancarai sebanyak 30 orang per HKm yang sudah ditentukan secara sengaja, yaitu Gapoktan KTM dan Gapoktan KB.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

#### **3.4.1 Pengumpulan Data Primer dan Data Sekunder**

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa data karakteristik responden, data sosial, dan data aset ekonomi responden diperoleh secara langsung di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara langsung terhadap responden dan pengisian kuesioner. Data sekunder berupa teori-teori penelitian yang diperoleh dari berbagai literatur seperti jurnal, buku, kajian penelitian lain, dan sumber instansi terkait yaitu Kantor KPH Batutegi tentang HKm.

#### **3.4.2 Wawancara**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai (Fathoni, 2006). Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data sosial berupa karakteristik responden yaitu umur, jenis kelamin, jenis tanaman yang dibudidayakan, pendapatan rata-rata keluarga, status dalam HKm, jumlah tanggungan, tingkat pendidikan, luas garapan di lahan HKm (Watung *et al.*, 2013). Lebih lanjut, data mengenai jarak dari tempat tinggal ke lahan HKm, pusat desa dan kecamatan, kepemilikan alat komunikasi dan informasi, kepemilikan ternak, kendaraan, kinerja penyuluhan, bantuan sosial dan kebun bibit, serta sosial budaya responden diperoleh dari penelitian (Pulungan *et al.*, 2015). Data ekonomi yang dikumpulkan yaitu pendapatan per kapita dari tiap rumah tangga. Pendapatan diperoleh dari jumlah hasil panen setiap jenis tanaman

yang dimiliki. Wawancara dilakukan kepada 60 responden dalam hal ini merupakan peserta Gapoktan KTM dan Gapoktan KB.

### 3.4.3 Sampel Penelitian

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dilakukan secara sengaja dengan ketentuan responden pengurus atau anggota gapoktan atau masyarakat penggarap HKm. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 30 responden per gapoktan dengan pertimbangan responden adalah petani penggarap lahan HKm yang merupakan pengurus atau anggota dari Gapoktan KTM dan Gapoktan KB. Menurut Mahmud (2011), untuk penelitian yang menggunakan analisis data statistik, ukuran sampel paling minimum adalah 30 sehingga jumlah sampel penelitian ini telah memenuhi dan dapat dinyatakan normal.

### 3.5 Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda menggunakan *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) dengan selang kepercayaan 90%, yang berarti bahwa kesalahan yang dapat ditoleransi sebesar 10% (Yudischa *et al.*, 2014). Analisis regresi linier merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel. Bentuk umum analisis ini yaitu menghubungkan variabel terikat (Y) dengan satu atau lebih variabel bebas. Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah pendapatan petani yang diperoleh dari mengelola lahan, sedangkan variabel bebas (X) meliputi aspek sosial yaitu bantuan sosial ( $X_1$ ), bantuan bibit ( $X_2$ ), *network*/jaringan ( $X_3$ ), *norm*/norma ( $X_4$ ), *trust*/kepercayaan ( $X_5$ ), dan aspek ekonomi meliputi jumlah tanaman ( $X_6$ ), luas garapan HKm ( $X_7$ ), kepemilikan kendaraan ( $X_8$ ), kepemilikan alat informasi ( $X_9$ ), dan kepemilikan alat komunikasi ( $X_{10}$ ).

Adapun persamaan Regresi Linear Berganda yaitu

$$Y = C + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + u_i \dots\dots\dots(1)$$

Adapun Penentuan skor pertanyaan pada kuesioner ditentukan sebagai berikut:

Tabel 1. Variabel penduga (predictor), simbolisasi dan pemberian skor dalam Model Sosial Gapoktan KTM dan KB

Kelompok variabel penduga [1]	Variabel penduga [2]	Simbolisasi dalam model [3]	Skala pengukuran dan satuannya [4]
Terikat	Pendapatan masyarakat pertahun	[Y]	Rp juta/tahun
Karakteristik Responden	1. Umur	[UMR] [PKJ]	Satuan tahun = 1 jika ada, = 0 jika tidak ada
	2. Pekerjaan sampingan	[S_HK <sub>m</sub> ]	= 1 jika pengurus, = 0 jika anggota
	3. Status dalam HK <sub>m</sub>	[S_MS <sub>YK</sub> ]	Jumlah jiwa
	4. Jumlah tanggungan	[JTG]	= 0 jika tingkat SD = 1 jika lainnya
	5. Pendidikan KK	[D2_SMP/ SLTA/S1]	= 1 jika ada, = 0 jika tidak ada
Sosial	1. Bantuan sosial	[SOS]	= 1 jika ada, = 0 jika tidak ada
	2. Bantuan bibit	[BIT]	= 1 jika banyak, = 0 jika sedikit
	3. <i>Network</i> (Jaringan)	[NET]	= 1 jika baik, = 0 jika tidak baik
	4. <i>Norm</i> (Norma)	[NORM]	= 1 jika baik, = 0 jika tidak baik
	5. <i>Trust</i> (Kepercayaan)	[TRUST]	= 1 jika baik, = 0 jika tidak baik

Persamaan regresi liniernya Aspek Sosial Terhadap Pendapatan adalah:

$$[Y] = C + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5$$

Keterangan:

Y = Pendapatan rumah tangga

C = Konstanta model

$\beta_{1-5}$  = Nilai kontribusi masing-masing variabel X.

X<sub>1</sub> = Bantuan sosial

X<sub>2</sub> = Bantuan bibit

X<sub>3</sub> = *Network*/jaringan

X<sub>4</sub> = *Norm*/norma

X<sub>5</sub> = *Trust*/kepercayaan

Tabel 2. Variabel penduga (predictor), simbolisasi dan pemberian skor dalam model Ekonomi Gapoktan KTM dan KB

Kelompok variabel penduga [1]	Variabel penduga [2]	Simbolisasi dalam model [3]	Skala pengukuran dan satuannya [4]
Terikat	Pendapatan masyarakat pertahun	[Y]	Rp juta/tahun
Karakteristik Responden	1. Umur	[UMR]	Satuan tahun
	2. Pekerjaan sampingan	[PKJ]	= 1 jika ada, = 0 jika tidak ada
	3. Status dalam HKm	[S_HKm]	= 1 jika pengurus, = 0 jika anggota
	4. Jumlah tanggungan	[JTG]	Jumlah jiwa
	5. Pendidikan KK	[D2_SMP/SLTA/S1]	= 0 jika tingkat SD =1 jika lainnya
Aset ekonomi	1. Jumlah jenis tanaman	[J_TNMN]	Jumlah angka
	2. Luas garapan HKm	[LG_HKm]	Jumlah angka Ha
	3. Kepemilikan kendaraan	[KNDR]	Jumlah angka
	4. Kepemilikan alat komunikasi	[HP]	= 1 jika ada, = 0 jika tidak ada
	5. Alat informasi	[TV]	= 1 jika ada, = 0 jika tidak ada

Sumber: Pulungan *et al.*, (2015).

Persamaan regresi liniernya Aspek Ekonomi Terhadap Pendapatan adalah:

$$[Y] = C + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8 + \beta_9 X_9 + \beta_{10} X_{10}$$

Keterangan:

Y = Pendapatan rumah tangga

C = Konstanta model

$\beta_{6-10}$  = Nilai kontribusi masing-masing variabel X.

$X_6$  = Jumlah 30 pretanaman

$X_7$  = Luas garapan HKm

$X_8$  = Kepemilikan kendaraan

$X_9$  = Kepemilikan alat informasi

$X_{10}$  = Kepemilikan alat komunikasi

Catatan: dilakukan uji regresi masing-masing dikedua Gapoktan Karya Tani Mandiri dan Karya Bakti per aspek ke pendapatan dan dianalisis data tersebut kemudian diuji dengan beberapa uji yaitu validitas, reabilitas, dan uji asumsi klasik.

### 3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Model Regresi Linier berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi klasik statistik, baik itu multikolinieritas, heteroskolinieritas, heteroskedastisitas, maupun autokorelasi. Menurut Rochaety (2009), regresi linier berganda bertujuan menghitung besarnya pengaruh dua atau lebih variabel terikat dan memprediksi variabel bebas terhadap satu variabel terikat dan memprediksi variabel terikat dengan menggunakan dua atau lebih variabel bebas.

#### 3.5.1.1 Normalitas Data

Menurut Gozali (2005), tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi normal. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah yang memiliki distribusi normal. Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal, maka digunakan pengujian *Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test* terhadap masing-masing variabel. Hipotesis dalam pengujian ini adalah:

$$H_0: F(x) = F_0(x), \text{ dengan}$$

$F(x)$  adalah fungsi distribusi populasi yang diwakili oleh sampel dan

$F_0(x)$  adalah fungsi distribusi suatu populasi berdistribusi normal.

$$H_1 : F(x) \neq F_0(x) \text{ atau distribusi populasi tidak normal.}$$

Pengambilan keputusan: Jika Probabilitas  $>0,05$ , maka  $H_0$  diterima

Jika Probabilitas  $<0,05$ , maka  $H_0$  ditolak

#### 3.5.1.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel penelitian tidak ortogonal. Ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas mana yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel bebas menjadi variabel terikat (dependen) dan diregresikan terhadap variabel bebas lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance*  $< 0.10$  atau sama dengan nilai VIF  $> 10$ . Walaupun nilai multikolinearitas dapat dideteksi dengan *Tolerance* dan VIF, namun tetap tidak dapat mengetahui variabel-variabel bebas mana yang saling berkorelasi (Ardian, 2019).

### 3.5.1.3 Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Jika varians berbeda, maka disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ardian, 2019). Untuk menguji apakah terjadi heterokedastisitas dapat dideteksi dengan berbagai metode diantaranya Metode Analisis Grafik, Metode Glejser, Metode Park, Metode White, dan Metode Rank Spearman (Rusman, 2022).

### 3.5.1.4 Uji Autokorelasi

Menurut Nugroho (2005), uji ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$ . Uji autokorelasi menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode dengan kesalahan pada

periode t-1 (sebelumnya), jika terjadi korelasi dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Deteksi autokorelasi dengan melihat besarnya Durbin-Watson (Ardian, 2019).

Tabel 3. Ketentuan Uji Autokorelasi

No	Keterangan	Keputusan	Nilai
1.	Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_L$
2.	Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$d_L < d < d_U$
3.	Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - d_L < d < 4$
4.	Tidak ada autokorelasi negatif	No decision	$d_U < d < 4 - d_L$
5.	Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak ditolak	$d_U < d < 4 - d_U$

### 3.5.1.5. Uji Kesesuaian

#### a. Uji F (Simultan)

Uji F adalah pengujian secara variabel bebas (independen) yang mempunyai hubungan atau pengaruh terhadap variabel terikat (dependen). Uji hipotesis secara simultan dalam penelitian ini dengan rumus:

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan:

$R^2$  = Koefisien korelasi ganda yang telah dikemukakan.

K = Jumlah variabel independen.

n = Jumlah sampel.

F = Tingkat signifikan (untuk ilmu sosial sebesar 5%).

#### b. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji tingkat signifikan antara variabel X<sub>1</sub> dengan variabel Y, variabel X<sub>2</sub> dengan variabel Y, dan variabel X<sub>1</sub> dengan variabel X<sub>2</sub>.

Rumusnya Uji t yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = Nilai t hitung

$r$  = Nilai koefisien korelasi

$n$  = Jumlah sampel

(Sudjana, 2001: 380)

### **c. Koefisien Determinasi**

Nilai  $R^2$  menunjukkan besarnya variasi variabel-variabel bebas dalam memengaruhi variabel terikat. Nilai  $R^2$  berkisar antara 0 dan 1. Semakin besar nilai  $R^2$  berarti semakin besar variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel bebas. Sebaliknya, semakin kecil nilai  $R^2$  berarti semakin kecil variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel bebas. Jadi informasi yang dapat diperoleh dari koefisien determinasi  $R^2$  adalah untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel bebas dalam menjelaskan variabel-variabel terikat. Sifat dari koefisien determinasi ini adalah:

$R^2$  merupakan besarnya non negative

Batasannya adalah  $0 < R^2 < 1$

Apabila  $R^2$  bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel-variabel bebas dengan variabel yang dijelaskan. Semakin besar nilai  $R^2$  menggambarkan semakin tepat garis regresi dalam menggambarkan nilai-nilai observasi. Tingkat  $R^2$  tinggi jika nilainya antara 0,4 sampai dengan 0,6 untuk penelitian di bidang sosial (Ardian, 2019).

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek sosial tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pendapatan masyarakat di Gapoktan Karya Tani Mandiri dan Karya Bakti. Variabel aspek sosial dalam hal ini yaitu bantuan sosial, bantuan bibit, *trust* (kepercayaan), dan norma disebabkan adanya faktor-faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.
2. Terdapat pengaruh signifikan secara simultan aspek ekonomi terhadap pendapatan masyarakat di Gapoktan Karya Tani Mandiri dan Karya Bakti, variabel aspek ekonomi ini yaitu jumlah jenis tanaman, luas garapan HKm, kepemilikan kendaraan, kepemilikan alat komunikasi dan informasi. Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan di Gapoktan Karya Tani Mandiri yaitu luas lahan garapan, dan pada Gapoktan Karya Bakti yaitu variabel luas lahan garapan dan kepemilikan alat komunikasi.

### 5.2 Saran

Saran dari penelitian ini yaitu sebaiknya dilakukan peningkatan kapasitas masyarakat penggarap lahan dikarenakan luas lahan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, namun sangat disayangkan jika tidak diberikan pelatihan dan sejenisnya untuk masyarakat. Selanjutnya, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait variabel-variabel yang belum diteliti seperti ada tidaknya kinerja penyuluh dan kepemilikan ternak ataupun faktor-faktor yang memungkinkan berpengaruh pada pendapatan masyarakat di Gapoktan Karya Tani Mandiri dan Karya Bakti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, F. Zunariyah, S. 2015. Modal sosial masyarakat dalam pengelolaan hutan rakyat (studi fenomenologi hutan rakyat di Kelurahan Selopuro, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri). *Jurnal Sosiologi Dilema*. 30 (1): 40-49.
- Adalina, Y., Nurrochman, R.D., Darusman, D., Sundawati. 2015. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar Gunung Halimun Salak. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*. 12(2): 105-118.
- Aghis, G.L.P., Hartono, R., Maryani, A. 2020. Peningkatan kapasitas petani dalam penerapan biopestisida pengendali hama pada tanaman Padi Sawah (*Oryza sativa* L.) di Desa Ciasmara Kecamatan Pamijahan. *Jurnal Inovasi Penelitian*. 1(4): 647-658.
- Ahada, N., Zuhri, A.F. 2020. Menjaga kelestarian hutan dan sikap cinta lingkungan bagi peserta didik MI/SD. *El-Banar: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*. 3(1): 35-46.
- Amelia, R. F. 2022. Dampak bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Kelurahan Paninggilan Utara Ciledug Kota Tangerang. *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Amini, R. 2013. Analisis partisipasi wanita nelayan dalam Program Usaha Garam Rakyat (Pugar) di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Media Ilmiah*. 38-41.
- Andriani, R., Kusumo, B., Rasmikayati, E., Mukti, G. W., Fatimah, S., Saefudin, B. R. 2018. Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan petani mangga dalam menggunakan Teknologi Off Season di Kabupaten Cirebon. *MIMBAR AGRIBISNIS: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*. 4(1): 57-69.
- Ardian, N. 2019. Pengaruh insentif berbasis kinerja, motivasi kerja, dan kemampuan kerja terhadap prestasi kerja pegawai UNPAB. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*. 4(2): 119-132.

- Armiwal, S. 2019. Tinjauan yuridis terhadap peranan pemerintah dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*. 2(2): 17–34.
- Arifandy, M. I., Sihaloho, M. 2016. Efektivitas pengelolaan hutan bersama masyarakat sebagai resolusi konflik sumber daya hutan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 3(2): 147-158.
- Aryadi, M. 2012. *Hutan Rakyat Fenomenologi Adaptasi Budaya Masyarakat*. UMM Press. Malang.
- Ayu, S.Y., Kaskoyo, H., Yuwono, S.B., Banuwa, I.S., Safe’I, R. 2022. Penilaian dampak hutan kemasyarakatan melalui sustainable livelihoods framework. *Jurnal Hutan Tropis*. 10(1): 47-56.
- Bakri, S., Darusman, D., Juanda, Bahruni. 2014. Pengembangan wilayah di bawah kendali sumber daya. *Jurnal Sosio Ekonomika*. 18(2): 161-170.
- Bakri, S., Setiawan, A. 2017. Welfare improvement model through forest recovery, empowering small enterprises and farmer’s parity schemes: An ethical choice problem of regional planning in Lampung-Indonesia. *Paper Presented on International Seminar of Agricultural Engineering (ISAE)*. 1-15.
- Bakri, S., Qurniati, R., Safe’i, R., Hilmanto, R. 2021. Kinerja modal sosial dalam kaitannya dengan pendapatan masyarakat agroforestry: Studi desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan. *Jurnal Hutan Tropis*. 9(1): 191-203.
- Cahyaningsih, N. 2006. Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Barat “Panduan Cara Memproses Perijinan dan kiat Sukses Menghadapi Evaluasi. Lampung Barat: Dinas Kehutanan dan PSDA. Lampung
- Cahyono, B., Adhiatma, A. 2012. Peran modal sosial dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat petani tembakau di Kabupaten Wonosobo. in: *Proceedings of Conference In Business, Accounting and Management (CBAM)*. 1(1): 131–144.
- Coe, R., Sinclair, F.L., Barrios, E. 2014. Scaling up agroforestry requires a research ‘in’ rather than ‘for’ development paradigm. *Current Opinion in Environmental Sustainability*. 6: 73-77.
- Cronkleton, P., Pulhin, J. M., Saigal, S. 2012. Comanagement in community forestry: how the partial devolution of management rights creates challenges for forest communities. *Conservation and Society*. 10(2): 91–102.
- Damayantanti, P. T. 2011. Upacara pelestarian hutan melalui pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat. *Jurnal Komunitas*. 3(1): 70-82.

- Dewi, P. M. 2012. Partisipasi tenaga kerja perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 5(2): 118-125.
- Dewi, I.N., Awang, S.A., Andayani, W., Suryanto, P. 2018. Karakteristik petani dan kontribusi hutan kemasyarakatan (HKM) terhadap pendapatan petani di Kulon Progo. *Jurnal Ilmu Kehutanan*. 12: 86-98.
- Dhruba Bijaya, G. C., Cheng, S., Xu, Z., Bhandari, J., Wang, L., Liu, X. 2016. Community forestry and livelihood in Nepal: A review. *Journal of Animal and Plant Sciences*. 26(1): 1-12.
- Ekawati, S., Nurrochmat, R. D. 2014. Hubungan modal sosial dengan pemanfaatan dan kelestarian hutan lindung. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 11(1): 11-15.
- Ekawati, S. 2014. *Pembangunan KPH di Indonesia*. In S. Ekawati dan B. Hernowo (Eds.), *Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan ( KPH ) : Langkah Awal Menuju Kemandirian*. PT Kanisius. Yogyakarta.
- Febryano, I. G., Suharjito, D., Darusman, D., Kusmana, C., Hidayat, A. 2015. Aktor dan relasi kekuasaan dalam pengelolaan mangrove di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 12(2): 125.
- Ferdian, A. 2019. Analisis faktor-faktor sosial ekonomi terhadap pendapatan usaha tani padi ladang dalam perspektif ekonomi islam (studi pada petani padi ladang di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan). *Skripsi*. UIN Raden Intan Lampung. Bandar Lampung.
- Frese M, Gielnik, M. M. 2014. The psychology of entrepreneurship. *Annu. Rev. Organ. Psychol. Organ. Behav.* (1): 413-38.
- Fitria, W., Suharjito, D., Ekawati, S. 2021. Peran kesatuan pengelolaan hutan (KPH) dalam implementasi perhutanan sosial: studi di KPH Produksi Kerinci, Provinsi Jambi Dan Kph Lindung Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 18(2): 145-160.
- Fitra, N. 2018. Keberadaan wisata hutan bakau terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. *Thesis*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Makassar.
- Ghozali, I. 2005. *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS* ,Edisi Ketiga. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Guillen, L. A., Wallin, I., Brukas, V. 2015. Social capital in small-scale forestry: a local case study in Southern Sweden. *Procedia Environmental Sciences*. 21-28.

- Hakim, Luchman. 2021. *Agroforstri kopi mendorong taman hayati dan wisata kopi*. Media Nusa Creative. Malang. 16hlm.
- Hamilton, W., Bosworth, G., Ruto, E. 2015. Entrepreneurial younger farmers and the “young farmer problem” in England. *Agriculture and Forestry*. 61(4): 61-69.
- Hanum, N. 2018. Analisis kondisi sosial ekonomi keluarga terhadap kesejahteraan keluarga di Gampong Karang Anyar Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*. 9(1): 42-49.
- Harahap, M., Herman, S. 2017. Social capital relationship with vegetable farmers productivity (case study on The Group of Tani Barokah Village Tanah Enam Ratus District Medan Marelan). *Journal of Agribusiness Sciences*. 1(1): 49–57.
- Heni, D. A., Pellondo, M. E., Rammang, N. 2021. Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar Kawasan Hutan Koa ( studi kasus Desa Linamnutu , Kecamatan Amanuban Selatan , Kabupaten Timor Tengah Selatan ). *Jurnal Wana Lestari*. 4(1): 45-055.
- Inayah, N. Kirya, I.K. Suwendra, I.W. 2014. Pengaruh kredit modal kerja terhadap pendapatan bersih Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) sektor formal. *e-Journal*. 2: 5.
- Indrawirawan, D., Riza, F., Pasya, G., Rozi, I., Haribowo, R. 2003. Pelaksanaan kebijakan Hutan Kemasyarakatan ( HKm ) di Provisasi Lampung. *WATALA World Agroforestry Center SE Asia Regional Office Ford Foundation DFID* 4.
- Jumanto, Martono, D. S. 2020. Dampak program perhutanan sosial skema hutan dan pendapatan petani hutan. *Gontor AGROTECH Science Journal*. 6(3): 579–602.
- Jose, S. 2012. Agroforestry for conserving and enhancing biodiversity. *Agroforestry Systems*. 85(1): 1-8.
- Kaskoyo, H., Mohammed, A., Inoue, M. 2014. Present state of community forestry (Hutan Kemasyarakatan /HKm) program in a protection forest and its challenges: case study in Lampung Province, Indonesia. *Journal of Forest Science*. 30(1): 15.
- Kaskoyo, H., Mohammed, A., Inoue, M. 2017. Impact of community forest program in protection forest on livelihood outcomes: A case study of Lampung Province, Indonesia. *Journal of Sustainable Forestry*. 36(3). 250-263.
- KEMENLHK. 2021. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

- Kiolol, N., Tilaar, W., Rotinsulu, W. 2017. Pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat di Desa Kampung Ambong Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. *Agri-SosioEkonomi Unsrat*. 13(3A): 179 - 190.
- Laura, N., Sari, R. D., Setiawan, I., Herdiyanti, H. 2018. Peran modal sosial masyarakat dalam pengelolaan potensi alam sebagai strategi bertahan hidup di Dusun Limang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. *Society*. 2(6): 74–82.
- Lewerissa E. 2015. Interaksi masyarakat sekitar hutan terhadap pemanfaatan sumber daya hutan di Desa Wangogira, Kecamatan Tobelo Barat. *Jurnal Agroforestry*. 10(1): 45-56.
- Mamuko, F., Walangitan, H., Tilaar, W. 2016. Persepsi dan partisipasi masyarakat dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Bolang Mongondow Timur. *Jurnal Eugenia*. 22(2): 80-92.
- Mahardika, A., Muyani, H. S. 2021. Analisis legalitas perhutanan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Asahan. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*. 1(1): 1–9.
- Mahendra. 2014. *Pengaruh Pendidikan, Upah, Jenis Kelamin, dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktifitas Kerja*: Universitas Diponegoro. Semarang
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Pustaka Setia. Bandung.
- Martapani, A. N., Fauzi, H., Naparin, M. 2021. Dampak hutan kemasyarakatan terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat studi kasus : masyarakat peduli gambut Sukamaju KPH Kayu Tangi. *Jurnal Rimba Lestari*. 1(1): 35–46.
- Mayrowani, H., Ashari, N. 2016. Pengembangan agroforestry untuk mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan petani sekitar hutan. *Forum penelitian Agro Ekonomi*. 29(2): 83.
- Mbow, C., Smith, P., Skole, D., Duguma, L., Bustamante, M. 2014. Achieving mitigation and adaptation to climate change through sustainable agroforestry practices in Africa. *Current Opinion in Environmental Sustainability*. 6:8-14.
- Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Muga, M.P.L., Kiak, N.T., Maak, C.S. 2021. Dampak penyaluran bantuan sosial tunai pandemi covid-19 (studi kasus di Kelurahan Sikumana – Kota Kupang) *OECOMICUS Journal of Economics*. 5(2). 106-112.
- Nababan, E. J. K., Qurniati, R., Kustanti, A. 2016. Modal sosial pada pengelolaan

- dan pelestarian Hutan Mangrove di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Sylva Lestari*. 4(2): 89–100.
- Nafisah, J. 2017. Pengaruh faktor demografi terhadap pendapatan tenaga kerja sektor primer di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Nair PKR. 1993. *An Introduction to Agroforestry*. Kluwer Academic Publisher. Dordrecht. the Netherlands. 211lm.
- Nandini, R., Kusumandari, A., Gunawan, T., Sadono, R. 2016. Impact of community forestry policy on farmers in Rinjani Protected Forest Area. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*. 9(1): 34–49.
- Nasrullah, M.A., Annisa, R. 2021. Analisis bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat tanah laut pada masa pandemi covid-19. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*. 4(2): 95-101.
- Nawira, M., Taksirawati, I., Baharuddin. 2017. Pemanfaatan Tanaman Pangi (Pangium Edule Reinw) pada lahan agroforestri Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*. 9(2): 123-130.
- Neil A., Golar, Hamzari. 2016. Analisis ketergantungan masyarakat terhadap hasil hutan bukan kayu pada Taman Nasional Lore Lindu (studi kasus Desa Sidondo I Kecamatan Biromaru dan Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa). *Jurnal Mitra Sains*. 4(1): 29-39.
- Nestle. 2022. Tentang Nestle. Diakses di <https://www.nestle.co.id/> pada 28 November 2022 pukul 06.57 WIB.
- Nino, K.H.E., Fallo, Y.M., Taena, W., Sipayung, B.P. 2022. Preferensi penggunaan pupuk bersubsidi petani padi sawah di Kecamatan Biboki Moenleu Kabupaten Timor Tengah Utara. *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan dan Pendidikan Vokasi Pertanian Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari*. 220-236.
- Nurrochmat, D. R., Darusman, D., Ruchjadi, D. 2014. Rekonstruksi sistem tenurial kehutanan. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*. 1(1): 24–29.
- Nurrochmat, D. R., Darusman, D., Ekayani, M. 2016. *Kebijakan Pembangunan Kehutanan dan Lingkungan*. IPB Press, Bogor.
- Oktadiani, Devi. 2018. Interaksi masyarakat yang tinggal di kawasan ub forest dalam penggunaan lahan hutan (studi kasus di Dusun Sumberwangi, Desa Donowarih dan Dusun Summersari, Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang). *Skripsi*. Universitas Brawijaya. Malang.

- Olivi, R. 2014. Kontribusi agroforestri terhadap pendapatan petani di Desa Sukoharjo 1 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Sylva Lestari*. 3(2):1—12.
- Pemerintah NKRI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 *tentang Kehutanan*. Indonesia
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P6/Menhut-II/2009 Tentang *Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan*. 2009. Indonesia. Menteri Kehutanan.
- Pranadji, T. 2016. Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam Pengelolaan Agroekosistem Lahan Kering Studi Kasus di Desa-Desa (Hulu DAS) Ex Proyek Bangun Desa, Kabupaten Gunungkidul dan Ex Proyek Pertanian Lahan Kering, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Agro Ekonomi Indonesian Agency For Agricultural Research and Development (IAARD)*. 24(2): 178–206.
- Puspasari, E., Wulandari, C., Darmawan, A., Banuwa, I.S. 2017. Aspek sosial ekonomi pada sistem agroforestri di areal kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*. 5(3): 95-103.
- Puspita, T. N., Qurniati, R. Febryano, I. G. 2020. Modal sosial masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Batutegi. *Jurnal Sylva Lestari*. 8(1): 54- 64.
- Pulungan, W. A., Bakri, S., Hilmanto, R. 2015. Telaah faktor sosial demografi terhadap kesetujuan masyarakat pada rencana pengembangan HTR di KPHP Gedong Wani. *Jurnal Sylva Lestari*. 3(3): 41–50.
- Putri, N.A.D., Setiawina, D. 2013. Pengaruh umur, pendidikan, pekerjaan terhadap pendapatan rumah tangga miskin di Desa Bebandem. *E-Jurnal EP Unud*. 2(4): 173-180.
- Putrayasa, I. M., Purbadharmaja, I. B. P. 2019. The influence of socialization and economic potential on productivity and income of Village Owned Entreprises in Seririt District. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science*. 24(1): 42-51.
- Qurniati, R., Febryano, I. G., Zulfiani, D. 2017. How trust influence social capital to support collective action in agroforestry development?. *Biodiversitas*. 18(3): 1201–1206.
- Rahayu, W. M., 2010. Persepsi, sikap dan perilaku masyarakat terhadap kelestarian hutan (Studi Kasus di Desa Cinagara dan Desa Pasir Buncir Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat). *Skripsi*. Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.

- Rochaety, E. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- RPHJP. 2014. *Rencana pengelolaan hutan jangka panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batutegi 2014-2023*. Lampung. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
- Ruhimat, I. S. 2010. Implementasi kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Banjar. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 7(3): 169–178.
- Rusman, T. 2022. *Aplikasi statistik penelitian dengan SPSS mudah dan cepat dipahami*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Safe'i, R., Febryano, I.G., Aminah, L.N. 2018. Pengaruh keberadaan gapoktan terhadap pendapatan petani dan perubahan tutupan lahan di hutan kemasyarakatan. *Sosiohumaniora-Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*. 20(2): 109 - 114.
- Sahide, M. A. K., Supratman, S., Maryudi, A., Kim, Y. S., Giessen, L. 2016. Decentralisation policy as recentralisation strategy: forest management units and community forestry in Indonesia. *International Forestry Review*. 18(1): 78–95.
- Samsu, A.K., Millang, S., Dassir, M. 2019. Peranan modal sosial terhadap pengembangan sistem agroforestri di Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*. 11(1): 73-78.
- Salampessy, M. L., Febryano, I. G., Martin, E., Siahaya, M. E., Papilaya, R. 2015. Cultural capital of the communities in the mangrove conservation in the Coastal areas of Ambon Dalam Bay, Moluccas, Indonesia. *Procedia Environmental Sciences*. 23: 222–229.
- Sanjaya, R., Wulandari, C., Herwanti, S. 2017. Evaluasi pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada Gabungan Kelompok Tani Rukun Lestari Sejahtera di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. *Jurnal Sylva Lestari*. (2): 30.
- Sanudin, S., Awang, S. A., Sadono, R., Purwanto, R. H. 2016. Perkembangan hutan kemasyarakatan di Provinsi Lampung (Progress of Community Forest in Lampung Province). *Jurnal Manusia dan Lingkungan*. 23(2): 276.
- Setiawan, D., Hardiansyah, G., Widhanarto, G.O. 2021. Identifikasi dampak pengelolaan hutan desa terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Bentang Pesisir Padang Tikar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Hutan Lestari*. 9(4): 640-651

- Secundo, G., Vecchio, P.D., Schiuma, G., Passiante, G. 2017. Activating entrepreneurial learning processes for transforming university students' idea into entrepreneurial practices. *International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research*. 23(3): 1-37.
- Sholeha, T.U. 2019. Pengaruh bantuan benih padi terhadap pendapatan usaha tani ditinjau dari ekonomi islam (Studi di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur). *Skripsi*. IAIN Metro. Metro.
- Singarimbun, Masridan Sofian Effendi. 2011. *Metode Penelitian Survei. Cet. IV*. LP3ES. Jakarta.
- Sylviani, Dwiprabowo, H., Suryandari, E.Y. 2014. Kajian kebijakan penguasaan lahan dalam kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 11(1): 54-70.
- Sugiyono.2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT.Alfabet. Bandung.
- Suhardan, D., Riduwan, Enas. 2012. *Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan*. Buku. Alfabeta. Bandung.
- Supratman,. 2009. Desain model pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. *Perennial*. 5(1): 36.
- Suryandari, E.Y. Sylviani. 2012. Kajian implementasi kebijakan organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di daerah (Studi kasus KPH Banjar, Kalimantan Selatan dan KPH Lalan Mangsang Mendis, Sumatera Selatan). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 9(2): 114-130.
- Susilo, S., Nairobi, Y. 2019. Dampak perhutanan sosial terhadap pendapatan masyarakat. *ISEI Economic Review*. 3(1): 16–27.
- Sumastuti, E. 2009. Analisis pendapatan keluarga petani tebu di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*. 5(1): 10-25.
- Syofiandi R. R., Hilmanto, R., Herwanti, S. 2016. Analisis pendapatan dan kesejahteraan petani agroforestri di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*. 4(2): 7-26.
- Taati, L. 2015. Analisis komposisi dan potensi hutan produksi di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dampelas Tinombo Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. *e-Jurnal Katalogis*. 3(11): 203-216.
- Thobias, E. 2013. Pengaruh modal sosial terhadap perilaku kewirausahaan (suatu studi pada pelaku usaha mikro kecil menengah di Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud). *Jurnal Acta Diurna*. 6(1): 125–133.

- Tiurmasari, S., Hilmanto, R., Herwanti, S. 2016. Analisis vegetasi dan tingkat kesejahteraan masyarakat pengelola agroforestri di Desa Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*. 4(3): 71-82.
- Wanderi, Qurniati, R., Kaskoyo, H. 2019. Kontribusi tanaman agroforestri terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani. *Jurnal Sylva Lestari*. 7(1): 118-127.
- WHO. 2013. A Global Brief on Hypertension. Global Public Health Crisis. Silent Killer. <https://www.who.int/> diakses pada 12 Januari 2023 pukul 14.55.
- Winarni, S., Wiyono, S. B., Hernawanti, S. 2016. Struktur pendapatan tingkat kesejahteraan dan faktor produksi agroforestry kopi pada Kesatuan Pemangkuan Hutan Lindung (KPHL) Batutegi. *Jurnal Sylva Lestari*. 4(1): 1-10.
- Wulandari, C. 2009. *Buku Ajar Kebijakan dan Peraturan Perundangan Kehutanan*. Buku. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 94 hlm.
- Wulandari, C., Budiono, P., Yuwono, S. B. Herwanti, S. 2014. Adoption of agroforestry patterns and crop systems around Register 19 Forest Park, Lampung Province, Indonesia. *Jurnal Pengelolaan Hutan Tropika*. 20(2): 86-93.
- Wulandari, C., Inoue, M. 2018. The importance of social learning for the development of community based forest management in Indonesia: The case of community forestry in Lampung Province. *Small-Scale Forestry*. 17(3): 361-376.
- Wulandari, C., Kurniasih, H. 2019. Community preferences for social forestry facilitation programming in Lampung, Indonesia. *Journal of Forestry and Society*. 3(1): 114-132.
- Wulandari, C. 2020. *Analisa pengarusutamaan gender dan social ekonomi: di proyek Cross Cutting Capacity Development (CCCD) di Model DAS Mikro (MDM) Way Khilau, Provinsi Lampung*. Pustaka Ali Imron. Bandar Lampung. 73hlm.
- Wulandari, C. 2021. Identifying climate change adaptation effort in the Batutegi Forest Management Unit. *Forest and Society*. 5(1): 48-59.
- Wulandari, C., Bakri, S., Riniarti, M., Putra, H. J. 2022. Peranan variabel demografis, pemilikan aset, dan aksesibilitas terhadap lahan pada kesetujuan perambah pada rencana pengembangan hutan kemasyarakatan: studi di KPH Selagai Lingga Lampung Tengah. *Jurnal Hutan Tropis*. 10(2): 114-123.

- Xiangzhi, B. V. N. Hoang, P.C. Tsung, Chen, P.C. 2020. A comprehensive model of onsumers' perceptions, attitudes and behavioral intention toward organic tea: evidence from an emerging economy. *Sustainability*. 12(10):2-17.
- Yani, W. N., Indrajaya, I. 2018. Analisis beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan kepala rumah tangga miskin di Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. 381-415.
- Yudischa, R., Wulandari, C., Hilmanto, R. 2014. Dampak partisipasi wanita dan faktor demografi dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) terhadap pendapatan keluarga di Kabupaten Lampung Barat. *Jurnal Sylva Lestari*. 2(3): 59-72.
- Zeilika, E., Kaskoyo, H. 2021. Kemasyarakatan terhadap kesejahteraan petani (studi kasus Gapoktan Mandiri Lestari KPH VIII Batutegi). *Jurnal Hutan Tropis Volume*. 9(2): 291–300.
- Zega, S.B., Agus, P., Martial, T. 2013. Analisis pengelolaan agroforestry dan kontribusinya terhadap perekonomian masyarakat. *Jurnal Peronema Forestry Science*. 2(2) : 152-162.